PERILAKU POLITIK KAUM SALAFI
(Respon terhadap Demokrasi di Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program S-1
Prodi Politik Islam

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : U-2011/.P1/004
K U-204 004 .P1	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

LILIS AGUSTULISTIANA
NIM : E04207014

PRODI POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Lilis Agustulistiana

ini telah diperiksa dan disetujui untuk

diujikan

Surabaya, 27 Januari 2011

Pembimbing,

Drs. Slamet Muliono Redjosari, M.Si
NIP. 196811291996031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Lilis Agustulistiana ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 9 Februari 2011

Mengesahkan,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin

Dekan,

Dr. H. Ma'sum Nuralim, M.Ag.
NIP. 169009141989031001

Ketua,

Drs. Slamet Muliono Redjosari, M.Si
NIP. 196811291996031003

Sekretaris,

M. Anas Fakhruddin, M.Si
NIP. 198202102009011007

Penguji I,

DR. H. M. Ismail MH, M.Si
NIP. 196005211986081001

Penguji II,

Dr. Khoirul Yahya, M.Si
NIP. 197202062007101003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Judul : **Perilaku Politik Kaum Salafi (Respon Terhadap Demokrasi di Kabupaten Blitar)**
Pembimbing : **Drs. Slamet Muliono Redjosari, M.Si**
Nama : **Lilis Agustulistiana**

Skripsi ini membahas sikap politik kaum Salafi terhadap demokrasi di Indonesia sesuai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*filed research*). Penelitaian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang menghasilkan deskripsi yaitu: *pertama,* makna politik bagi kaum Salafi. *Kedua,* perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, makna politik bagi kaum Salafi merupakan strategi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat dunia dan akhirat dengan menggunakan segala kemampuan yang dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* (bijaksana). Cara berpolitik kaum Salafi yakni menjaga hak dan kewajiban serta berperan aktif dalam mewujudkan tujuan bangsa dan negara sesuai koridor-koridor yang dibenarkan oleh *syar'i.* Dakwah kaum Salafi terfokus pada Islamisasi masyarakat dengan tidak menyentuh wilayah politik. Terbukti dengan tidak membentuk organisasi massa, kelompok bahkan partai politik karena bertentangan dengan prinsip *hizbiyyah. Hizbiyyah* dinilai sebagai metode baru yang tidak ada landasan hukumnya. Fokus dakwah kaum Salafi terpusat pada Islamisasi masyarakat khususnya menginginkan pemurnian ajaran Islam dan diimplementasikan pada pemikiran dan perilaku dalam berbangsa dan bernegara.

Kedua, perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Indonesia. Kaum Salafi menyatakan diri bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang tidak sesuai dalam Islam, tetapi kaum Salafi berperan aktif dalam demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, kaum Salafi terlihat bersifat melioris yakni antara menolak dan menerima demokrasi. Kaum Salafi lebih memilih menyesuaikan diri dalam demokrasi dengan berpegang pada ajaran syari'at. Ajaran syari'at dipahami dan diterapkan dalam prinsip-prinsip demokrasi, seperti adanya pemilu, partai politik, pemerintah, isu gender, kebebasan HAM dan pers. Artinya perilaku politik kaum Salafi tercermin dari ajaran syari'at yakni Al Qur'an dan Sunnah serta fatwa para mujtahid.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis menyadari adanya banyak kekurangan dalam penelitian ini, baik dari segi pemaparan data dan analisis. Dengan demikian, pembaca bersedia menelaah ulang secara kritis perilaku politik kaum Salafi dalam konteks demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: *Politik Salafi, Demokrasi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

ABSTRAKSI xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Pembahasan 10

D. Manfaat Pembahasan 10

E. Penegasan Judul 11

F. Telaah Pustaka 13

G. Metode Penelitian 18

H. Sistematika Pembahasan 26

BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIK

A. Definisi Konsep Perilaku Politik 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik 30

C. Definisi Perilaku Elit 33

D. Teori Perilaku Elit 34

E. Teori Gerakan Keagamaan 37

F. Mempertegas Makna Salafi 40

G. Akar Munculnya Kaum Salafi 42

H. Kelompok-kelompok Salafiyyah 45

I. Sejarah Kaum Salafi Indonesia 49

J. Definisi Konsep Demokrasi 54

K. Teori Demokrasi 60

BAB III : PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Letak Geografis 62
2. Aspek Pendidikan 63
3. Aspek Kesehatan 65
4. Aspek Ekonomi 66
5. Aspek Politik 68

B. Majelis Taklim Kaum Salafi di Kabupaten Blitar

1. Keadaan Ustadz dan Jama'ah Salafi 69
2. Perkembangan Dakwah Kaum Salafi 73

C. Respon Kaum Salafi Terhadap Demokrasi di Kabupaten Blitar 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Makna Politik bagi Kaum Salafi di Kabupaten Blitar

1. Makna Politik 81
2. Reformasi Politik 86
3. Orang yang Berhak Berpolitik 88
4. Tipologi Politik Kaum Salafi 92

B. Perilaku Politik Kaum Salafi dalam Merespon Demokrasi di Kabupaten Blitar

1. Perilaku Politik Kaum Salafi Terhadap Pemilu 95
2. Perilaku Politik Kaum Salafi Terhadap Peran Partai Politik 100
3. Sikap Politik Kaum Salafi Terhadap Pemerintah
   a. Cara Taat pada Pemerintah 103
   b. Hukum Kudeta pada Pemerintah 105
   c. Pandangan pada Pemerintah Indonesia 112
4. Pandangan Kaum Salafi Tentang Wacana HAM 113
5. Respon Kaum Salafi Terhadap Antusiasme Gender 114
6. Respon Kaum Salafi Terhadap Kebebasan Pers 120

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 123

B. Saran 124

DAFTAR PUSTAKA 125

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Ulama'-ulama' Salafi 44

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 63

Tabel 3.2 Tingkat Perkembangan Pendidikan 64

Tabel 3.3 Tingkat Perkembangan Kesehatan Masyarakat 65

Tabel 3.4 Tingkat Perkembangan Ekonomi Masyarakat 67

Tabel 3.5 Daftar Informan 69

Tabel 3.6 Jadwal Majelis Taklim Salafi di Kabupaten Blitar 71

Tabel 3.7 Jadwal Majelis Taklim Salafi di Kelurahan Jingglong 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tulisan skripsi ini mengkaji tindakan politik kaum Salafi[1] terhadap demokrasi sesuai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Fokus kajian prinsip-prinsip demokrasi meliputi pemikiran politik, pandangan dan tanggapan kaum Salafi pada pemilu dengan mengamati bentuk partisipasinya, sikap politik pada pemerintah, pandangan dan penilaian peran partai politik, wacana tentang HAM, antusiasme gender dalam parlemen dan kebebasan pers yang mempengaruhi roda politik dalam proses demokrasi di Indonesia.

Dipilihnya Salafi dalam studi ini karena sisi ideologi. Salafi mengusung ideologi puritan dengan slogan kembali pada Al Qur'an dan Sunnah dengan mencontoh amalan para sahabat dan *salafus shalih.*[2] Dengan demikian, dakwah Salafi diklaim sebagai gerakan dakwah yang mengajarkan dan mengamalkan syari'at secara murni. Kaum Salafi menjaga agar tidak terkontaminasi oleh

---

[1] Istilah Salaf sering diucapkan dan dimaksudkan sebagai generasi pertama dari kalangan sahabat dan *tabi'in* yang berada dalam fitrah yang selamat dan bersih dengan wahyu Allah. Generasi yang menyandarkan aqidah kepada Al Qur'an dan Sunnah yang suci. Pemikiran tersebut belum ternodai oleh pemahaman filsafat asing. Batasan zaman tiga generasi pertama adalah generasi yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaannya. Adapun batasan *manhaji* adalah orang-orang yang konsisten memegang prinsip-prinsip Al Qur'an dan Sunnah, mengutamakan prinsip-prinsip akal manusia dan mengembalikan semua permasalahan yang diperselisihkan pada Al Qur'an dan Sunnah. Dan orang-orang setelah mereka dan menempuh jalan setelah mereka dinisbahkan menjadi *salafi.* Lihat Syaikh Muhammad bin Rabi' bin Hadi Al Madkholi dan Abu Hasan Mushthofa bin Isma'il As Sulaimani, *Perbedaan Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah Menuju Pemahaman Salaf* terj. Abu Usamah Ibnu Rowiyah An Nawawy (Tegal: Maktabah Salafy Press, 2001), 17-20.

[2] Abu Mujahid dan Haneef Oliver, *Virus Wahabi: Mitos Negatif bagi Salafi* (Bandung: Toobagus Publishing, 2010), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok atau organisasi yang bertentangan dengan Islam, sehingga terwujud Islam yang *rahmatan lil 'alamin.*

Selain itu, menurut kaum Salafi gerakan *hizbiyyah* (kelompok atau partai yang berdakwah melalui jalur politik) adalah cara baru yang tidak ada dasar hukumnya. Kaum Salafi menilai gerakan *hizbiyyah* membuat tujuan utama berdakwah terabaikan karena terfokus pada kepentingan politik sendiri (fanatisme golongan).[3] Dengan demikian, Kaum Salafi melawan seluruh bentuk fanatisme golongan seperti partai politik. Realitasnya, partai politik cenderung memobilisasi massa untuk meraih kekuasaan semata (pragmatisme kekuasaan).

Syaikh Al Albani[4] juga berpendapat bahwa kaum muslimin terlarang masuk dalam parlemen karena dipastikan melakukan penyimpangan dari ajaran Islam. Bentuk penyimpangannya yakni melakukan mu'amalat riba pada lembaga-lembaga pemerintahan.[5] Hakekatnya, anggota-anggota parlemen dipilih melalui proses pemilu. Dalam pemilihan umum keputusan akhir diserahkan pada suara mayoritas. Kaum Salafi menilai suara mayoritas bukan kehendak Tuhan. Menurut kaum Salafi, hal ini bertentangan dengan Islam. Dalam Islam kekuasaan adalah milik Allah. Muslim dilarang menyerahkan kekuasaan pada kaum mayoritas yang belum tentu memperjuangkan Islam.[6]

---

[3] Luqman Baabduh, *Musuh-musuh Dakwah Tauhid* (Asy Syari'ah 22, 2006), 24-25.

[4] Syaikh Nashiruddin Al Albani adalah salah satu tokoh Salafi yang memberikan fatwa kepada FIS (Islamic Salvation Front) yakni partai Islam di Aljazair seputar pemilu.

[5] Syaikh Abdul Malik Al Jazair, *Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen: Fatwa Syaikh Nashiruddin Al Albani* (Yogyakarta: Media Hidayah, 1999), 55-56.

[6] Luqman Baabduh, *Musuh-musuh*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan hasil penelitian Ahmad Bunyan Wahib menggambarkan bahwa kaum Salafi sebagai gerakan anti Barat, yang tidak mau mengamalkan segala bentuk dan ideologi yang berkaitan dengan Barat.[7] Ideologi Barat merupakan bentuk nyata dari upaya penyelewengan dan penyimpangan ajaran Islam yang benar. Ide-ide Barat adalah geneologi dari musuh-musuh Islam, terutama Yahudi dan Kristen yang bertujuan untuk menghancurkan Islam.[8]

Sedangkan, M. Imdadun Rahmat menyatakan dakwah kaum Salafi terfokus kepada Islamisasi masyarakat dan tidak menyentuh wilayah politik (non-politis). Dalam menjalankan dakwahnya, kaum Salafi juga tidak boleh membentuk organisasi massa, karena bertentangan dengan prinsip *non-hizbiyyah.*[9]

Berdasarkan temuan-temuan di atas, spekulasi pemikiran-pemikiran kaum Salafi menjadi bahan diskusi yang menarik dan perlu diperjelas. Indonesia yang berproses menuju demokrasi membutuhkan kerjasama dari warga Indonesia sebagai bentuk partisipasinya. Bagaimana kaum Salafi menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan metode dakwahnya. Hakekatnya, setiap warga negara memiliki hak berpartisipasi aktif atau pun pasif untuk menentukan pilihan, termasuk kaum Salafi.

Kaum Salafi dikatakan tidak menyentuh wilayah politik (non-politis) oleh M. Imdadun Rahmat. Dengan demikian, kaum Salafi dinilai berperilaku non-

---

[7] Ahmad Bunyan Wahib, *Gerakan Dakwah Salafi Paska Laskar Jihad* (4, 2007), 25.
[8] Luqman Baabduh, *Musuh-musuh,* 26.
[9] M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revibalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2009), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politis, tetapi minimal kaum Salafi memiliki pemikiran dan pandangan politik untuk diaplikasikan dalam sistem demokrasi Indonesia sesuai pemahamannya.

Sistem demokrasi adalah salah satu ide Barat yang diadopsi dan diimplementasikan oleh Indonesia dalam sistem pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya. Realitasnya, demokrasi tidak lepas dari unsur yang dinamakan pemilu. Rakyat secara tidak langsung diminta berpartisipasi dalam demokrasi.

Prinsip-prinsip negara demokrasi kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis, sehingga dapat diukur dan dicirikan. Afan Gaffar, setelah mengamati demokrasi di berbagai negara merumuskan demokrasi menjadi lima indikator. Maka, diperlukan prasyarat untuk mengamati apakah suatu tatanan politik (*political order*) merupakan sistem demokratis atau tidak, yaitu:[10]

Pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan publik yang dipilih rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan segala kebajikannya baik yang akan dilakukan maupun yang telah diimplementasikan kepada *public* (masyarakat). Selain itu, pemegang jabatan juga harus mempertanggungjawabkan kata-katanya dan prilakunya selama memegang jabatan publik. Dalam konteks ini, pemegang jabatan bersedia menghadapi *public scrutiny* (penyelidikan kritis masyarakat), terutama yang dilakukan media massa.

---

[10] Afan Gaffar, *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 1996), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai, sehingga tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang lain tertutup. Biasanya, partai politik yang menang pada pemilu diberi kesempatan membentuk eksekutif, sehingga dapat mengendalikan pemerintah sampai pemilihan berikutnya. Dalam negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaan hanya dilakukan terbatas dikalangan elit politik saja.

Ketiga, rekruitmen politik terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekruitmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai kesempatan yang sama. Sedangkan, negara yang tidak demokratis, rekruitmen politik dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik dilakukan beberapa orang saja.

Keempat, pemilihan umum. Dalam suatu negara yang demokratis, pemilu dilaksanakan secara teratur dengan asas jujur dan adil tanpa rekayasa. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan hanya sesuai dengan nuraninya. Rakyat bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa rasa takut dan paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktifitas pemilihan, seperti kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.

Kelima, menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, seperti hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*) digunakan untuk menentukan preferensi politiknya, hak untuk berkumpul atau berserikat (*freedom of assembly*) ditandai dengan kebebasan menentukan lembaga atau organisasi yang dibentuk dan dipilihnya serta hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the pass*).

Berdasarkan rincian lima indikator demokrasi di atas, membutuhkan pembahasan yang panjang, maka perlu adanya pembatasan kajian skripsi ini meliputi pandangan dan tanggapan kaum Salafi tentang pemilu, pemerintah, partai politik, HAM, gender dan kebebasan pers sebagai tolak ukur demokrasi sehingga dapat mengetahui dan membaca sikap politik kaum Salafi.

Salah satu seremonial demokrasi yakni pemilihan umum sebagai metode sistem demokrasi tujuannya memilih perwakilan rakyat sebagai pembuat hukum dan memilih pemimpin untuk menjalankan hukum yang dibuat perwakilan rakyat tersebut. Konsekuensinya masyarakat diminta terlibat dengan pijakan keputusan mayoritas. Siapa yang layak dipilih, kriterianya menjadi keputusan mayoritas. Pemilihan pemerintah juga tergantung dengan suara mayoritas. Rakyat pun memiliki hak untuk memecat kepala pemerintah dengan pijakan-pijakan hukum yang dibuat lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan umum dan pemilihan kepala pemerintahan keputusannya diserahkan pada suara mayoritas. Suara mayoritas dinilai kaum Salafi bukan kehendak dari Tuhan karena suara mayoritas belum tentu menjamin tidak berbuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan dan kesesatan.[11] Solusi untuk memecahkan persoalan umat Islam menurut kaum Salafi dengan kembali pada hukum kehidupan yang diciptakan Allah SWT sebagai Sang Pencipta yakni Al Qur'an dan Hadits.

Selanjutnya, partai politik berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat. Realitas yang terjadi, partai politik gagal membawa amanah dari rakyat. Perjuangan partai politik untuk rakyat kurang terlihat, yang terlihat justru akomodasi kepentingannya sendiri lebih dominan. Secara konseptual, kaum Salafi menggunakan istilah *hizb* untuk menunjukkan kelompok atau partai sebagai gerakan politik yang tujuan utamanya kekuasaan bukan dakwah. Cara berdakwah melalui *hizb* tidak ada landasan hukumnya dan tujuan utama berdakwah diabaikan.[12]

Indikator demokrasi berikutnya tentang kebebasan berekspresi selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam undang-undang telah diatur tentang hak setiap warga negara dalam memeluk agama, memperoleh pendidikan dan tempat tinggal yang layak. Termasuk quota 30% dalam pencalegan sebagai representasi (keterwakilan) perempuan dalam parlemen. Kebebasan pers pun berpengaruh dalam perkembangan demokrasi sebagai penyampaian informasi dan penyalur opini publik.

Prinsip-prinsip demokrasi di atas, dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Prinsip-prinsip

---

[11] Ahmad Bunyan Wahib, *Gerakan*, 25.
[12] Ahmad Bunyan Wahib, *Gerakan*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

demokrasi juga digunakan sebagai tolak ukur fokus kajian skripsi ini. Realitas-realitas konsekuensi demokrasi di atas, membutuhkan tanggapan dari kaum Salafi untuk mengerucutkan ideologi berpikir kaum Salafi dari segi teori dan realitas dalam demokrasi.

Dalam demokrasi, khususnya era Reformasi secara tidak langsung membuka ruang gerak kaum Islamis termasuk kaum Salafi di Kabupaten Blitar yang mulai menyebarkan nilai-nilai Islam untuk diamalkan dari pribadi setiap kaum muslimin, keluarga dan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui ajakan-ajakan mempelajari ilmu dan mengamalkan sesuai pribadi-pribadi masing-masing. Dakwah kaum Salafi di Kabupaten Blitar tidak berdiri pada satu pondok pesantren, tetapi terkumpul dalam Majelis Taklim tergantung pada masyarakat yang mau mempelajari *manhaj* Salafi sesuai dengan kedekatan rumah masing-masing orang.[13]

Berdasarkan hal di atas, kaum Salafi di Kabupaten Blitar bukan sebuah organisasi, tetapi kumpulan orang-orang yang ingin memahami dan mengamalkan Al Qur'an dan Sunnah maka tidak memiliki pondok pesantern. Al Qur'an dan Sunnah sebagai metode pemahaman dan pengamalan yang mana Rasul dan para sahabat berada di atasnya. Dakwah Salafi tidak diukur tempat dan waktu, tetapi metode pemahaman dan pengamalan. Artinya setiap kaum muslim berhak

[13] Observasi, di Majelis Taklim Salafi Kelurahan Jingglong, 15 Desember 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut dirinya sebagai Salafi selama memegang nasehat Rasul dan para sahabat.[14]

Hakekatnya, seluruh kaum muslim berhak menyebarkan dakwah seluas-luasnya pada masyarakat dengan tidak menjadi kelompok yang inklusif. Kaum Salafi di Kabupaten Blitar, tidak berdiri di bawah naungan struktur termasuk pemimpin dan koordinator. Kaum Salafi di Kabupaten Blitar, tidak pernah mengirim undangan dan mempromosikannya artinya tidak struktur yang mengikatnya secara formal. Cara dakwahnya yakni dari keinginan pribadi kemudian bercerita pada teman, tetangga, saudara kemudian didirikan Majelis Taklim tersebut di atas, dengan memanfaatkan tempat yang ada. [15]

Dari satu orang tersebar ke orang lain tertarik setelah mendengarkan dakwah Salafi, kemudian tersebar ke kecamatan lain. Penyebaran itu kemudian mendapat respon dari orang yang ingin belajar Salafi, sehingga Da'i Salafi diminta menyampaikan *taklim*. Maka, tidak ada yayasan, organisasi bahkan pondok pesantren formal untuk mengaturnya, artinya kesadaran orang untuk menunaikan kebutuhan manusia dalam beragama.[16]

Hal di atas menjadi fokus yang diteliti, kaum Salafi perspektif pemikirannya masih dipertentangkan banyak kalangan. Kehidupan politik kaum Salafi dalam model demokrasi perlu dipertanyakan ulang bahkan dikaji secara mendalam. Berdasarkan realitas di atas, penulis mengupas secara mendalam ruang

---

[14] Observasi, di Majelis Taklim Salafi Kelurahan Jingglong, 15 Desember 2010.
[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerak dakwah Salafi dalam pemikiran politik bahkan implikasi pemikiran politiknya dalam bingkai demokratisasi Indonesia. Maka, penulis mengambil judul **"Perilaku Politik Kaum Salafi (Respon Terhadap Demokrasi Di Kabupaten Blitar)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna politik bagi kaum Salafi di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Pembahasan

1. Menghasilkan deskripsi makna politik bagi kaum Salafi di Kabupaten Blitar.
2. Menghasilkan deskripsi perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Pembahasan

1. Secara teoritis, tulisan ini dapat menghasilkan sebuah pemahaman baru tentang makna politik bagi kaum Salafi dan mengetahui perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Kabupaten Blitar, baik secara aktif maupun pasif merupakan penilaian perilaku politik.
2. Secara praktis, manfaat tulisan ini dapat berimplikasi bagi pembaca khususnya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mahasiswa Prodi Politik Islam dapat mengetahui bagaimana makna politik bagi kaum Salafi sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan politik secara rasional berlandaskan agama dan mengetahui (membaca) perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Kabupaten Blitar, sehingga sejauh mana peran kaum Salafi dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan bahkan dalam bidang politik.
b. Pembaca pada umumnya dapat mengetahui bagaimana makna politik bagi kaum Salafi sehingga dapat memberikan kesepahaman berpikir tanpa harus menghakimi satu sama lain terhadap kebenaran dan mampu memahami perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Kabupaten Blitar.

E. Penegasan Judul

Penegasan Judul adalah penjelasan secara operasional tentang apa yang dimaksud oleh beberapa istilah dalam variabel penelitian, agar tidak terjadi kerancuan makna atau salah persepsi dan mempertegas interpretasi terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul "Perilaku Politik Kaum Salafi (Respon terhadap Demokrasi di Kabupaten Blitar)", maka perlu penegasan sebagai berikut:

Pertama, "Perilaku Politik" secara sederhana adalah perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan proses politik. Perilaku politik merupakan salah satu aspek ilmu politik yang berusaha mendefinisikan, mengukur, menjelaskan pendangan seseorang, ideologi dan tingkat partisipasi politik. Model yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik yakni *pertama,* lingkungan sosial politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsung. *Kedua,* lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor. *Ketiga,* struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu terdapat tiga basis fungsional sikap. *Keempat,* situasi lingkungan politik langsung.[17]

Kedua, "Kaum Salafi" menurut Syaikh Shalih Al Fauzan yang membuat pernyataan mengenai metode Salaf dan Salafi sebagai berikut:

> Salafi bukanlah sekte di antara sekte-sekte yang ada, sebagaimana yang kita kenal pada hari ini. Karena itu, Salafi adalah sekelompok orang yang berada di atas jalan para Salaf, di atas sesuatu yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Dan Salafi bukan pula aliran di antara aliran-aliran Islam kontemporer yang ada pada hari ini.[18]

Jadi, Salafi sebutan bagi orang yang mengikuti atau mengaku dirinya sebagai pengikut ajaran Salaf (tiga generasi sesudah Nabi Muhammad SAW yakni Sahabat, *Tabi'in* dan *Tabiut Tabi'in*). Salafi (jama'ah berpaham Salaf) dengan kata lain yakni pengikut ajaran Salaf baik karena predikat atau klaim orang terhadap dirinya. Salafi jama'nya Salafiyyun artinya aliran dalam Islam yang mengajarkan syari'at Islam tanpa adanya penambahan atau pengurangan.

Ketiga, "Respon terhadap demokrasi". Kata respon menurut kamus ilmiah populer adalah reaksi, jawaban dan reaksi balik atas sesuatu.[19] Sedangkan demokrasi sering diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, respon terhadap demokrasi adalah reaksi atau jawaban terhadap demokrasi

---

[17] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 131-132.

[18] Abu Mujahid dan Haneef Oliver, *Virus,* 190.

[19] Burhani Ms dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer* (Jombang: Lintas Media, -), -.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa penilaian, tanggapan, model berpikir, partisipasi serta makna politik bagi kaum Salafi dan perilaku politik dalam merespon demokrasi di Indonesia.

Keempat, "Kabupaten Biltar" adalah berbatasan dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Tulungagung dan kabupaten Kediri sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Kediri dan kabupaten Malang. Sementara itu, sebelah Selatan adalah samudera Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya. Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka kabupaten Blitar mempunyai ketinggian ± 167 meter dan luas 1.588,79 km^2. Lokasi kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa. Tepatnya terletak antara 111°40'-112°10' Bujur Timur dan 7°58'-8°9'51'' Lintang Selatan. Adapun jumlah penduduk kabupaten Blitar pada tahun 2008 mencapai 1.268.194 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki-laki 630.754 jiwa. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km^2.[20]

F. Telaah Pustaka

Penulis menjadikan buku-buku karya asli kaum Salafi sebagai rujukan untuk menghindari kesalahfahaman penafsiran sehingga mendapat sumber bacaan yang otentik. Karya Syaikh Abdul Malik Al Jazairi berjudul *"Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen : Fatwa Syaikh Nashiruddin Al Albani"* (Yogyakarta: Media

[20] http://www.blitarkab.go.id/ diakses tanggal 22 Desember 2010 pukul 14:44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hidayah, 1999) mengkaji tentang partai, pemilu dan parlemen dari sisi hukum Islam apakah halal atau haram. Buku tersebut merupakan cuplikan dari buku *Madarikun Nadlar Fis Siyasah* yang diteliti oleh Syaikh Nashiruddin Al Albani yang berbicara tentang partai, pemilu, parlemen, nasehat politik kepada para pemuda Islam, pedoman memperjuangkan Islam dan kiprah politik FIS di Aljazair. Buku tersebut menyoroti permaslahan partai yang muncul bagai jamur pada musim hujan dari sisi syari'at.

Selanjutnya, karya Syaikh Muhammad bin Rabi' bin Hadi Al Madkholi dan Abu Hasan Mushthofa bin Isma'il As Sulaiman berjudul *"Perbedaan Ahlus Sunnah dan Ahlus Bid'ah Menuju Pemahaman Salaf"* (Tegal: Maktabah Salafy Press, 2001) berisi tentang penjelasan tentang Salaf dan Salafiyah dan menyingkap tabir perbedaan antara *Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah* dengan tujuan membongkar kedok-kedok *hizbiyyun* dan menjelaskan kebenaran jalan *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* dengan maksud mendapatkan *istiqomah* dari Allah SWT.

Termasuk karya Abu Mujahid dan Haneef Oliver dijadikan berjudul *"Virus Wahabi: Mitos Negatif bagi Salafi"* (Bandung: Toobagus Publishing, 2010) berisi tentang penjelasan universal mengenai Wahabi, hubungan mesra Osama bin Laden dan Sufi, eksistensi ideologi Quthbi dalam merongrong dunia, gerakan radikal Al Qaeda, Jama'atul Jihad, Salafi versus Wahabi, fitnah seputar Wahabi dan kebenaran *manhaj* Salafi.

Buku tokoh Salafi juga dihimpun oleh Luqman bin Muhammad Ba'abduh dalam buku *"Mereka adalah Teroris!"* (Malang: Pustaka Qaulan Sadida, 2005),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berisi bantahan terhadap buku *"Aku Melawan Teroris"* karya Imam Samudra dan pembahasan tentang fatwa para ulama seputar hukum *al khuruj* terhadap pemerintah.

Penulis menjadikan jurnal "*Gerakan Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad*" Ahmad Bunyan Wahib sebagai jurnal kunci dalam fokus penelitian. Jurnal tersebut tergambar bagaimana pandangan politik kaum Salafi tentang anti *hizbiyyah* dan anti Barat (ideologi) terkait paham demokrasi.

Rujukan lacakan penulis selanjutnya yakni tulisan Salafi yakni pada media *on line* bernama *Asy Syariah* diisi oleh para ulama'-ulama' Salafi. *Asy Syariah* banyak mendeskripsikan tentang kepemimpinan laki-laki lebih utama dari perempuan, ketaatan pada pemimpin dengan syarat tertentu, penolakan terhadap demokrasi, kedudukan perempuan. Semua hal tersebut, didasari dengan teks Al Qur'an dan Hadits. Media *on line* tersebut, banyak mengupas habis tulisan asli tokoh-tokoh Salafi sehingga dapat diketahui sudut pandang Salafi seutuhnya.

Selanjutnya, menurut kaum Salafi dalam pemilihan pemimpin telah diajarkan dalam Islam. Ajaran Islam tentang pemilihan pemimpin juga dikonsepsikan oleh Imam Al Mawardi dalam kitab *"Al Ahkam As-Sultaniyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam"* terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006) tentang keharusan adanya bentuk pemerintahan dalam Islam tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan rasional sehingga dapat memfasilitasi kepentingan umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, karya Ibnu Taimiyah berjudul "*Siyasah Sar'iyah (Etika Politik Islam)*" menerangkan tentang *wilayat* (jabatan dan metodologi pengangkatan dalam pemerintahan) dengan cara mengangkat pemimpin yang lebih *ashlah* (paling layak dan sesuai), memilih yang terbaik (mumpuni), sedikitnya manusia yang mempunyai sifat *quwwah* (otoritas) dan amanat sekaligus seta metodologi untuk mengetahui yang layak dalam pengangkatan pemimpin.

Buku Afan Gaffar *"Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) merinci sejumlah persyaratan apakah sebuah *political order* merupakan sistem yang demokratis atau tidak, yaitu: akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekruitmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan menikmati hak-hak dasar.

Klasifikasi konsep demokrasi di Indonesia masih menuai pro kontra sehingga Masdar Hilmy dalam buku *"Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orba"* (Yogyakarta: Kanisius, 2009) mengkaji tentang dua aliran dalam Islam yang merespon tentang konsep demokrasi dan keterlibatan dua aliran Islam tersebut dalam demokrasi.

Di Indonesia pemikiran gerakan Islam diamati oleh M. Imdadun Rahmat dalam bukunya "*Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revibalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia"* (Jakarta: Erlangga, 2009), mempunyai titik tekan asal mula gerakan Salafiyyah dari Timur Tengah, tujuan dakwah kaum Salafi diantaranya kembali pada Al Qur'an dan Hadits yang otentik, mendidik kaum muslim dari syirik, bid'ah yang tidak dikenal dari ajaran-ajaran Islam dll. Selain itu, dakwah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum Salafi dalam buku tersebut juga dinyatakan berprinsip non *hizbiyyah.* Dakwah kaum Salafi melawan seluruh fanatisme golongan berdasarkan partai atau tidak.

Buku pendukung lainnya yakni karangan Afadlal dkk, "*Islam dan Radikalisme di Indonesia*" (Jakarta: LIPI Press, 2005) berisi tentang sejarah masuknya dakwah kaum Salafi ke Indonesia, perkembangan Salafi di Indonesia pasca Laskar Jihad, dakwah Salafi dideskripsikan dalam buku tersebut mengharapkan mengubah wajah Indonesia sesuai sudut pandang Salafi yakni mengikuti praktek Islam yang murni mengikuti tiga generasi yaitu sahabat, *tabi'in* dan *tabiut tabi'in,* dan politik bukan menjadi tekanan dalam dakwah kaum Salafi.

Muhammad Sa'i dalam jurnal hasil penelitannya yang berjudul "*Gerakan Dakwah Salafiyah: Konflik ideologis dan Sosial di Lombok Barat*" berupaya mengupas dakwah Salafiyah yang dilakukan di Lombok Barat secara puritan sesuai *salafus shalih*, tetapi dakwah Salafi tersebut menimbulkan konflik sosial antar masyarakat Salafi dan non Salafi, kaum Salafi terkenal dengan pembid'ahan terhadap kelompok lain yang tidak sesuai dengan perspektif Salafi mengakibatkan ketegangan fisik non Salafi. Fokus kajian jurnal ini yakni tentang aqidah perspektif kaum Salafi sebagai penjelas apologi dakwah Salafi.

Muhammad Ikhsan dalam *Wahdah Islamiyah on line* berjudul "*Gerakan Salafi Modern di Indonesia*" menjelaskan sikap kaum Salafi terhadap politik (parlemen dan pemilu) yakni ide utama kaum Salafi bukanlah gerakan politik dalam arti praktis. Keterlibatan proses politik praktis seperti pemilu sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah *bid'ah* dan penyimpangan (dipegang oleh Salafi Yamani). Muhammad As Sewed ketika menjabat sebagai ketua FKAWJ mengulas kerusakan-kerusakan pemilu.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Skripsi penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sesuai dengan obyek yang peneliti pilih sebagai deskripsi komunitas secara langsung (data sebenarnya) di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, kesesuaian masalah dan tujuan serta konsepnya, penulis mengupas secara mendalam bagaimana perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Kabupaten Blitar. Dengan demikian, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala holistik-kontekstualis melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Laporan penelitian ini disusun dalam bentuk narasi bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik secara otentik.[21] Dengan demikian, fokus analisis penelitian ini adalah perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Kabupaten Blitar.

---

[21] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN Kediri, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan, pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1987) adalah prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menaksirkan fenomena secara mendalam sampai akar dari permasalahan dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.[22] Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (*observable*).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar sebagai gambaran perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena kaum Salafi di Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar adalah kaum Salafi yang berdakwah dengan tidak bernaung di bawah institusi atau struktur tertentu. Hal tersebut, menurut kaum Salafi bukanlah tindakan *haraki* (gerakan), karena tidak dibatasi oleh pemimpin, koordinator, struktur yang diartikan sebagai loyalitas suatu kelompok atau organisasi massa. Profil Abu Muhammad Ubaidillah sebagai alumni Yaman, membuat paradigma berpikirnya berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya model berpikirnya mengikuti syaikh-syaikh asli dari Yaman, berbeda

[22] Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahamannya ketika hanya menerjemahkan pemikiran tokoh-tokoh Salafi dari Indonesia sendiri.

3. Sumber data

Sumber data untuk penelitian ini digolongkan menjadi dua bagian berdasar kebutuhan, sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data utama (sumber data orang pertama) dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan saat terjun langsung ke lapangan tempat penelitian.

Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Informan dipilih berdasarkan kebutuhan, serta berkaitan dengan tema penelitian. Informan yaitu tokoh-tokoh Salafi antara lain: Ustadz Abu Muhammad Ubaidillah dan Jama'ah Majelis Taklim di Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar.

Kriteria sumber data primer adalah orang yang berpengaruh (Ustadz dan Jama'ah) dalam komunitas kaum Salafi dan mampu mengeksplor data-data yang mendukung judul skripsi tersebut serta anggota kaum Salafi untuk menyamakan persepsi para pemuka kaum Salafi. Alasan memilih sumber primer karena membutuhkan informan untuk data-data skripsi sesuai judul tersebut agar data-data valid karena berasal dari kaum Salafi sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, majalah *online*, *browsing*, dan dokumen negara, misalnya *www.asysyari'ah.com, www.salafyblitar.blogsome* dan *www.blitarkab.go.id.*

4. Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Awalnya informan pertama ditentukan oleh peneliti yang dianggap sebagai *key* informan yakni Ustadz Abu Muhammad Ubaidillah. Berdasarkan *key* informan tersebut, diperoleh informasi 11 (sebelas) informan terkait dengan penelitian (terlampir). Informan dibagi menjadi dua yaitu:

Pertama, Ustadz atau Dai' Majelis Taklim kaum Salafi di Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. *Kedua*, Jama'ah Majelis Taklim kaum Salafi di Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Jumlah informan dapat di tambah jika sumber data belum mencukupi data yang dibutuhkan. Tingkat kejenuhan data menjadi pembatas akhir jumlah subyek penelitian. Dengan demikian, fokus analisis penelitian ini adalah perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Kabupaten Blitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yakni membicarakan tentang bagaimana cara penulis mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi (pengamatan)

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan pengamatan menggunakan panca indera.[23] Marshall menyatakan bahwa, "*Through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*". Melalui observasi, penulis belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.[24] Adapun observasi yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis observasi non-partisipasif.

Metode observasi ini, penulis tidak hanya mengamati obyek studi tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada obyek tersebut. Selain itu metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang situasi dan kondisi secara universal dari obyek penelitian, yakni letak geografis atau lokasi penelitian dan dinamika dakwah kaum Salafi di Majelis Taklim Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar.

---

[23]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial:Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142.

[24]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh keterangan atau informasi dari terwawancara.[25]

Wawancara dilakukan dengan dua cara yakni:[26]

Pertama, wawancara tertutup adalah wawancara secara bebas tanpa pedoman wawancara (*guide*). Sekalipun tanpa pedoman, wawancara tetap diarahkan pada kebutuhan data yang hendak dikumpulkan dengan berlangsung secara alamiah dan kondisional.

Kedua, wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan sederet daftar pertanyaan lengkap dan terinci serta diperlihatkan pada terwawancara.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagaimana yang tercantum dalam sumber data primer.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri benda-benda tertulis sebagai data historis.[27]

---

[25]Burhan Bungin, *Metodologi*, 133.
[26] Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (Tropodo: Alpha, 1997), 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet, dan koran yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu analisis perilaku politik kaum Salafi (respon terhadap demokrasi di Kabupaten Blitar).

6. Teknik Analisis Data

Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebut model interaktif. Model interaktif terdiri dari tiga hal utama, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan Huberman, 1992). Gambar model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman sebagai berikut: [28]

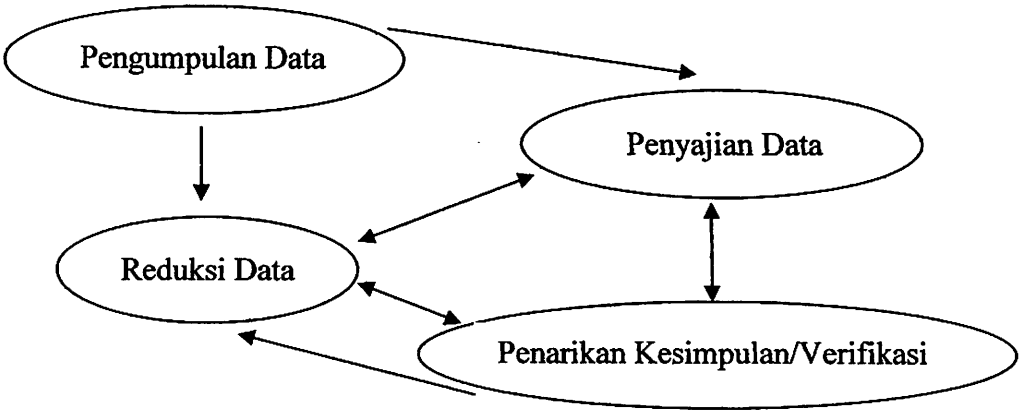

[27] Burhan Bungin, *Metodologi*, 152.
[28] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2011), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses analisis interaktif ini merupakan proses siklus dan interaktif. Artinya, peneliti bergerak aktif di antara empat "sumbu" kumparan, yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model analisis data kualitatif (Miles dan Huberman, 1992) sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilih, pemfokusan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstarakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan (*field notes*). Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.[29]

Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan analitis. Dengan demikian, proses reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk penarikan kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.[30]

---

[29] *Ibid.*, 150.
[30] *Ibid.*, 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan.[31]

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Miles dan Huberman (1992) menyatakan bahwa sejak pemulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelas, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab-akibat dan proposisi. Proses verifikasi hasil temuan dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil temuan-temuan terdahulu dan melakukan cek silang (*cross check*) dengan temuan lainnya. Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas hasil temuan.[32]

H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yang sistematis terbagi

[31] *Ibid.*, 151.
[32] *Ibid.*, 151-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi lima bab masing-masing terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Kerangka penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan berupa permulaan dari kajian skripsi, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat pembahasan, penegasan judul, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka konseptual dan teoritik berisi definisi konsep perilaku politik, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, definisi perilaku elit, teori perilaku elit, teori gerakan keagamaan, mempertegas makna Salafi, akar munculnya kaum Salafi, kelompok-kelompok Salafiyyah, sejarah kaum Salafi Indonesia, definisi konsep demokrasi dan teori demokrasi.

Bab ketiga, penyajian data berisi gambaran umum lokasi, Majelis Taklim kaum Salafi di Kabupaten Blitar dan respon kaum Salafi terhadap demokrasi di Kabupaten Blitar.

Bab keempat, analisis data meliputi makna politik bagi kaum Salafi di Kabupaten Blitar dan perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Kabupaten Blitar.

Bab kelima, penutup penelitian meliputi kesimpulan dari penelitian dan dilengkapi dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORITIK

A. Definisi Konsep Perilaku Politik

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga politik, antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.[1] Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksi sebagian berupa perilaku politik yaitu perilaku yang berkaitan dengan proses politik. Namun, perlu dipahami tidak semua individu atau kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik.

Ada pihak yang memerintah, ada pula yang menaati pemerintah dalam artian ada yang mempengaruhi, menentang, berkompromi, menjanjikan, kecewa karena janji tidak terpenuhi, negoisasi dan tawar-menawar, menutupi kenyataan yang sebenarnya, mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang akan terjadi, semua ini merupakan perilaku politik.

Jadi, perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Seorang individu atau kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya. Perilaku politik dibagi menjadi dua yaitu perilaku politik lembaga-

---

[1] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga dan para pejabat pemerintah dan perilaku politik warga negara (baik individu maupun kelompok).[2] Lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah bertanggungjawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, sedangkan warga negara bertanggungjawab mempengaruhi lembaga pemerintahan untuk menjalankan fungsinya guna kesejahteraan hidup warga negaranya.

Sehubungan dengan hal di atas, muncul pertanyaan "Siapakah" sesungguhnya yang melakukan kegiatan politik, individu atau struktur? pendekatan behavioralisme akan menjawab bahwa individulah yang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu yang berpola tertentu.[3] Di balik tindakan lembaga-lembaga politik dan pemerintah seperti keputusan pemerintah, tindakan legislatif, keputusan pengadilan dan keputusan partai terdapat sejumlah individu yang membuat keputusan dan melakukan tindakan maka perlu dianalisis latar belakang individu yang mengendalikan lembaga tersebut.

Secara faktual, tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan kewenangan) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan, tetapi juga dipengaruhi oleh kepribadian individu membuat keputusan, seperti: keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman.

---

[2] *Ibid.*, 18.
[3] *Ibid.*, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sistem politik yang mantap, mungkin lembaga lebih menonjol daripada kepribadian individu. Dalam konteks dan permasalahan tertentu, ketika membuat keputusan untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat mungkin sedikit banyak ada intervensi kepribadian individu. Sedangkan, pendekatan perilaku itu sendiri adalah model perilaku politik dan konsep partisipasi politik.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik

Kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan analisis yaitu individu aktor politik, agregasi politik dan tipologi kepribadian politik. Kategori individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), aktivis politik dan warga negara biasa. Definisi agregasi adalah individu aktor politik secara kolektif, seperti kelompok kepentingan birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan dan bangsa. Sedangkan, tipologi kepribadian politik adalah tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, Machiavelist dan demokrat.[4] Sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik merupakan kombinasi tiga pendekatan yaitu psikologi, struktural fungsional dan struktural konflik.

Menurut model tersebut, ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik yaitu: [5]

---

[4] *Ibid.*, 132.
[5] *Ibid.*, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa. *Kedua*, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah dan komunitas pergaulan. Di Lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup. Lingkungan langsung dipengaruhi lingkungan tak langsung.

Ketiga, srtuktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu, terdapat tiga basis fungsional sikap yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri. Kepentingan artinya penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut. Sedangkan, penyesuaian diri adalah penilaian terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk sesuai dan selaras dengan objek tersebut. Terakhir, eksternalisasi dan pertahanan diri ialah penilaian seseorang terhadap konflik batin atau tekanan psikis berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi dengan *aggressor* (penyerang).

Keempat, lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika akan melakukan kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, kehadiran orang lain, suasana komunitas dan ancaman dengan segala bentuk.

Faktor lingkungan sosial politik tak langsung mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung berupa sosialisasi, internalisasi, politisasi dan situasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor lingkungan sosial politik berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasi akan mempengaruhi struktur kepribadian (sikap).

Orang banyak mengira perilaku berawal dari masa anak-anak, sebagai perilaku acak lingkungan tempat munculnya perilaku berupa soaial atau fisik, dipengaruhi oleh perilaku dan selanjutnya "bertindak" kembali dalam berbagai cara. Reaksi ini, entah positif, negatif atau netral mempengaruhi perilaku aktor berikutnya. Sosiolog perilaku memusatkan perhatian pada hubungan antara sejarah reaksi lingkungan atau akibat dan sifat perilaku saat ini. Sosiolog perilaku juga mengatakan bahwa perilaku akibat masa lalu menentukan perilaku masa kini sehingga dapat diramalkan apakah aktor akan menghasilkan perilaku yang sama dalam setiap situasi.

Hal tersebut digunakan untuk membaca perilaku kaum Salafi yang berpegang teguh pada kemurnian ajaran Islam berdasarkan Al Qur'an dan Hadits untuk diterapkan dalam kehidupan. Dasar berpikir kaum Salafi tersebut, apakah akan berpola sama jika dihadapkan dengan dunia perpolitikan dalam iklim demokrasi di Indonesia. Konsistensi kaum Salafi inilah yang menjadi tolak ukur, bahwa perilaku masa lalu menentukan perilaku masa kini sehingga dapat diramalkan dalam setiap situasi. Banyak di luar sana para komunitas yang awalnya berpegang teguh pada prinsip berdakwah, ketika berhadapan dengan politik kemudian berafiliasi menjadi dakwah politik. Contoh: afiliasi LDK (Lembaga Dakwah Kampus) menjadi partai politik yakni Partai Keadilan (PK) sekarang lebih dikenal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Definisi Perilaku Elit

Salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik adalah pemimpin politik dan pemerintah. Dalam masyarakat terdapat stratifikasi dari segi kekuasaan yaitu : yang memiliki kekuasaan disebut elit (pemimpin), yang tidak memiliki kekuasaan dan yang mematuhi pemilik kekuasaan disebut massa rakyat. Maka, konsep dan teori "elit" juga akan menjadi kajian kerangka konseptual dan teoritik.

Menurut Vilfredo Pareto, kepemimpinan politik berbeda dengan elit politik. Elit adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang paling dinilai tinggi dalam masyarakat, seperti *prestise*, kekayaan atau kewenangan. Memiliki kekuasaan politik berbeda dengan memiliki kepemimpinan politik, karena dua hal yaitu jenis sumber pengaruh yang digunakan dan tujuan penggunaan pengaruh.[6]

Pareto menyodorkan teori elit perubahan sosial yang berpendirian bahwa masyarakat jelas akan didominasi oleh sejumlah kecil elit yang memerintah berdasarkan kepentingan diri sendiri. Elit kecil ini, memerintah massa rakyat yang memang didominasi oleh faktor non rasional. Menurut Pareto, karena kapasitas rasional massa terbatas, mereka bukan sebuah kekuatan revolusioner. Perubahan sosial terjadi ketika elit mengalami kemrosotan moral dan digantikan oleh elit baru yang berasal dari elit yang tak memerintah.[7]

---

[6] Ramlan Surbakti, *Memahami,* 134.
[7] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori,* 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, Pareto menawarkan teori perubahan sosial melingkar dengan mengabaikan penderitaan manusia, elit datang dan pergi tetapi sebagian besar massa tetap sama. Pareto membayangkan masyarakat sebagai sebuah sistem yang berada dalam keseimbangan, sebagai kesatuan yang saling bergantung. Perubahan satu bagian menyebabkan perubahan bagian lain dari sistem.

Sedangkan, Gaetano Mosca melukiskan distribusi kekuasaan dalam masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol.[8] *Pertama,* kelas yang memerintah yang terdiri dari sedikit orang, melaksanakan fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang ditimbulkan dengan kekuasaan. *Kedua,* kelas yang diperintah yang berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa berdasarkan hukum, kehendak dan paksaan.

D. Teori Perilaku Elit

Gambaran Gaetano Mosca di atas, Ramlan Surbakti berasumsi bahwa pada realitasnya setiap masyarakat tidak pernah mendapat distribusi kekuasaan secara merata. Masyarakat yang memiliki sumber dan jumlah kekuasaan politik sedikit sekali dibanding dengan jumlah penduduk dalam masyarakat-negara. Asumsi kedua, jumlah orang yang memerintah suatu masyarakat selalu lebih sedikit daripada yang diperintah. Oleh karena itu, elit politik dirumuskan sebagai sekelompok kecil orang yang mempunyai pengaruh besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Asumsi ketiga, di antara elit politik terdapat

[8] *Ibid.*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesamaan nilai dan berusaha mempertahankan nilai-nilai artinya mempertahankan status elit politik.

Kelompok elit politik ditelaah dari segi sifat dan karakternya adalah kelompok yang heterogen. Kelompok elit politik dapat digolongakan menjadi tiga tipe.[9] *Pertama,* elit politik yang dalam segala tindakan berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan. Elit tipe ini cenderung bersifat tertutup, dalam arti menolak golongan yang bukan elit memasuki lingkungan elit. Di antara sesama elit, tipe ini terdapat kolaborasi untuk mempertahankan keadaan yang ada. Oleh karena itu, lapisan politik tidak hanya berbentuk piramid dan hirarki, tetapi juga tidak tanggap atas aspirasi dan tuntutan masyarakat. Elit ini disebut konservatif artinya sikap dan perilaku yang cenderung memelihara dan mempertahankan struktur masyarakat yang secara jelas menguntungkan.

Kedua, elit politik liberal artinya sikap dan perilaku yang membuka seluas-luasnya bagi setiap masyarakat untuk meningkatkan status sosial. Elit ini cenderung bersifat terbuka pada golongan masyarakat yang bukan elit untuk menjadi bagian dari lingkungan elit, sepanjang yang bersangkutan mampu bersaing secara sehat untuk menjadi elit. Adanya kesempatan yang sama dan persaingan yang sehat untuk menjadi elit cenderung membuat pelapisan masyarakat bersifat pluralis. Elit politik cenderung berorientasi pada kepentingan masyarakat umum sehingga kelompok elit akan bersikap tanggap atas tuntutan masyarakat.

---

[9] *Ibid.*, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, pelawan elit (*counter elite*) aritinya para pemimpin berorientasi pada masyarakat dengan cara menentang segala bentuk kemapanan (*established order*) maupun dengan menentang segala bentuk perubahan. Ciri-ciri kelompok ini, yakni ekstrem, tidak toleran, anti-intelektualisme, beridentitas superioritas rasial tertentu dan menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya.

Kelompok pelawan elit terdiri dari dua sayap yaitu sayap kiri (*left wing*) yang menuntut perubahan secara radikal dan revolusioner, sedangkan sayap kanan (*right wing*) yang menentang berbagai perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Namun, kedua sayap ini memperlihatkan diri sebagai pembawa suara rakyat dan menuntut agar rakyat menguasai hukum, lembaga-lembaga, prosedur dan hak-hak individu.[10]

Elit politik konservatif dan liberal terdapat persamaan meliputi yang memerintah, yang membuat dan yang melaksanakan keputusan politik atau yang mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif kepada masyarakat hanya kelompok kecil orang yang mempunyai kekuasaan politik aktual. Kecuali, elit politik tersebut berupaya mempertahankan kedudukannya yang istimewa.

Berdasarkan deskripsi teori Pareto menyatakan bahwa dalam masyarakat pasti terdapat sebuah elit kecil yang mempertahankan diri dengan kepentingan sendiri, tetapi elit tersebut bukanlah revolusioner. Begitu juga dengan kaum Salafi merupakan komunitas elit kecil yang konsisten berpegang pada Al Qur'an dan Hadits dengan kepetingan sendiri untuk menyebarkan dakwah berdasar *Manhaj*

[10] *Ibid.*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salaf. Militansi yang kuat dalam mengikuti Majlis Taklim memungkinkan kaum Salafi menjadi kekuatan revolusioner dalam masyarakat.

Berbeda dengan Mosca, bahwa dalam masyarakat terdapat dua kelas yakni kelas yang memiliki sedikit orang dengan menikmati kekuasaan politiknya dan kelas yang memiliki banyak orang dikendalikan oleh hukum dan paksaan. Deskripsi Mosca tersebut diasumsikan oleh Ramlan Surbakti bahwa kelompok elit berdasarkan sifat dan karakternya dapat digolongkan menjadi beberapa tipe yakni: elit politik yang dalam segala tindakan berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan, elit politik liberal dan pelawan elit (*counter elite*) yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Penggolongan tersebut digunakan untuk membaca perilaku kaum Salafi masuk dalam kelompok elit politik yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau elit liberal bahkan pelawan elit. Realitas dalam berdakwah kaum Salafi mengajak seluruh umat muslim untuk kembali pada kemurnian Islam berdasar Al Qur'an dan Sunnah artinya kaum Salafi bertujuan seluruh umat muslim berpedoman sama dengan kaum Salafi dan menjadi bagian dari kaum Salafi tersebut.

E. Teori Gerakan Keagamaan

Pembahasan mengenai potret gerakan keagamaan (Islam) sebagai respon ideologi Barat dan respon terhadap modernisme berupa nir-spiritual (kekosongan spiritual) serta harapan untuk merehabilitasi sejarah Islam sesuai masa Nabi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahabat. Ideologi gerakan khususnya Islam tersebut oleh William Shepard dalam tulisannya *"Islam and Ideology : Toward A Typology"* diklasifikasikan sebagai berikut: [11]

Pertama, Sekulerisme Islam adalah gerakan yang ingin mengganti Islam disemua aspek kehidupan semua aspek privat maupun publik. Membagi wilayah agama dan dunia, karena sifat Islam hanya pengalaman-pengalaman ibadah saja bukan kebebasan masyarakat dalam pemerintahan dan Islam tidak menjawab urusan negara.

Kedua, Islam Radikal mengklaim bahwa Islam adalah untuk segala aspek sosial sama halnya kehidupan personal. Mereka setuju dengan modernisasi bahwa Islam itu fleksibel dan Islam bukan "Tahayul" ini harus dihilangkan. Mereka juga menerima kebutuhan mutlak ijtihad, tetapi mereka menyukai untuk memberikan sedikit skup dan mereka menekankan bahwa harus dilakukan Islam seontentik mungkin. Dan tidak menyembunyikan makna dari godaan Barat termasuk demokrasi (pluralisme, gender, pemilu dll).

Ketiga, Tradisonalisme Islam adalah gerakan yang mempertimbangkan syariah dan non syariah dengan berbagai *alibi* (pembenaran), sehingga merespon budaya modern secara ketat dalam hal paradigma yang ditawarkan untuk mengatasi kesulitan yang ada. Ancaman tegas terhadap Barat karena dianggap sebagai musuh dan kafir (tradisionalis rejeksionis). Pemahaman Al Qur'an masih

---

[11] William E. Shepard, *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History,* ed Syafiq Mughni (Canada: Conundrum Press, -), 416-418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murni, tetapi tidak semurni paham radikalisme Islam karena tradisionalisme masih merespon budaya modern walau pun dengan ketat.

Keempat, Neo-tradisionalisme Islam adalah gerakan yang menerima teknologi Barat secara selektif. Menerima budaya lokal yang tidak bertentangan dengan Islam. Ide *progress* (kemajuan) tidak diterima karena Islam telah sempurna dan Islam tidak mengalami *progress*.

Kelima, Modernisme Islam adalah menerima ide-ide tertentu, percaya dengan adanya *progress* (kemajuan), misal menerima teknologi Barat untuk mendukung dasar kehidupan publik. Menerima perilaku tertentu yang orientasinya untuk berubah, misal menerima demokrasi. Artinya menerima institusi modern tertentu (parlemen, parpol dll) untuk proses keberlangsungan sistem pemerintahan. Menjauhkan keterikatan antara Al Qur'an dan Hadits, tekstualisasi penafsiran mulai bergeser karena pemaknaan tekstual mulai ditinjau kembali sehingga pendekatan Barat terkadang lebih dominan bahkan sangat membuka ideologi-ideologi Barat.

Klasifikasi William Shepard di atas, bertujuan untuk mengklasifikasikan kaum Salafi memiliki kecenderungan masuk dalam kategori gerakan Islam yang mana Sekulerisme Islam, Islam Radikal, Tradisonalisme Islam, Neo-tradisionalisme Islam atau Modernisme Islam dengan identitas khusus yang melekat dalam tubuh kaum Salafi. Artinya bagaimana kaum Salafi memandang keterkaitan antara demokrasi dan Islam, sesuai sumber pedoman berpikir kaum Salafi yakni Al Qur'an dan Hadits. Realitas kaum Salafi tidak membenarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kaum Salafi anti Barat, tetapi demokrasi adalah produk yang diadopsi dari Barat. Dan kaum Salafi berpendapat bahwa *hizbiyyah* tidak ada landasan hukumnya, maka temuan awal tersebut perlu diverifikasi ulang bahwa kaum Salafi masuk dalam klasifikasi William Shepard yang mana dan telah tersebut di atas.

F. Mempertegas Makna Salafi

Gerakan radikalisme Islam di Indonesia mempunyai tujuan bervariasi, meskipun semuanya berbicara atas nama Islam masing-masing gerakan memiliki karakteristik dan penekanan tujuan yeng berbeda. Ada yang ingin menegakkan syari'at Islam diformalkan untuk menjadi sumber perundangan di Indonesia dan ada pula gerakan yang bertujuan mendirikan kekhalifahan Islam. Hakekatnya sama-sama ingin menerapkan syari'at Islam, tetapi setiap gerakan mempunyai orientasi dan cara berbeda dalam merealisasikan harapannya. Selain itu, karakter keorganisasian atau kelompok berbeda-beda. Oleh karena itu, penulisan skripsi mencoba mempertegas makna Salafi dan mengidentifikasikan karakteristik kaum Salafi.

Kata Salafi berasal dari bahasa Arab yaitu *salaf* artinya generasi yang lalu (terdahulu). *Salaf* disini diartikan sebagai para sahabat Nabi Muhammad yang memahami dan mempraktekkan Islam sebagaimana dipraktekkan Nabi. Jadi, Salafi adalah penisbatan terhadap orang-orang yang mempratekkan Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang dianjurkan atau dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat.[12]

Menurut Haedar Nashir, Salafi adalah sebutan bagi orang yang mengikuti atau mengklaim diri sebagai pengikut ajaran *salaf*. *Salaf* adalah masa terdahulu, suatu era kehidupan tiga generasi sesudah Nabi, yaitu para sahabat, *tabi'in* (pengikut sahabat), dan *tabi'ut-tabi' in* (pengikut para *tabi'in*) yang pola kehidupan keagamaannya dipandang ideal. Salafi juga sering disamakan dengan "jamaah berpaham salaf", mirip dengan Salafiyah sebagai aliran atau mazhab. Orang yang mengikuti paham Salafi disebut *salafiyyun* atau *salafiyyin*, yakni mereka yang menjadi pengikut ajaran *salaf*, baik karena klaim dirinya maupun predikat orang terhadapnya.[13]

Salafi bukan hanya tumbuh beragam cabang, bahkan menampilkan perbedaan paham yang sangat keras satu sama lain. Perbedaan paham yang serba ekstrim sering mengantarkan kaum Salafi pada sikap gampang saling menyesatkan. Karena soal paham dan pertentangan yang keras, tidak jarang mereka melakukan sumpah keagamaan untuk menentukan siapa benar dan siapa salah di antara mereka.

Rentang paham keagamaan kaum Salafi memang tajam dan keras. Kelompok Salafi aqidah atau "dakwah" membatasi diri hanya pada praktek keagamaan yang mereka klaim bersih dari syirik, *bid'ah*, dan *kurafat*. Kelompok

---

[12] Afadlal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 154
[13] Haedar Nashir, "Ketika Salafi Berebut Tafsir", Gatra, 35 (2007), -.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini pada tingkat yang paling *rigid* membid'ahkan apa saja yang di luar mereka pahami, termasuk membid'ahkan organisasi dan lebih-lebih politik. Kelompok Salafi "haraki", yang melibatkan diri dalam pergerakan keagamaan, tak kecuali dalam politik.

G. Akar Munculnya Kaum Salafi

Salah satu aktor kebangkitan Islam di Timur Tengah ialah kaum Salafi, karena kaum Salafi pada hakekatnya tidak pernah menjadi satu jamaah atau kelompok saja. Tidak pernah ada institusi formal yang menjadi tempat bernaung kaum Salafi. Salafi merupakan ajaran yang murni dan bebas dari penambahan, pengurangan dan perubahan. Salafi bukanlah partai politik dan mazhab baru. Tetapi, dakwah Salafi merupakan Islam dalam totalitasnya, yang menuntun semua manusia. Salafi merupakan metode (*manhaj*) yang lengkap dan sempurna dalam memahami Islam dan melaksanakan tindakan sesuai ajaran-ajarannya.[14]

Purifikasi ajaran Islam juga sering disebut Salafiyah, Salafiyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab *salaf* berarti generasi terdahulu atau nenek moyang. Sedangkan secara terminologi, Salafiyyah adalah sebagai khazanah ilmu yang bersumber dari pemahaman secara mendalam terhadap ajaran *salafus shalih.*[15] Dengan demikian, Salafiyyah mengacu pada metodologi berpikir kembali

---

[14] M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2009), 64.

[15] Muhammad Sa'i, *Gerakan Dakwah Salafiyah: Konflik Ideologis dan Sosial di Lombok Barat* (2006), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada sumber pemikiran Islam yaitu Al Qur'an, kehidupan Nabi Muhammad SAW (Sunnah atau Hadits) dan generasi awal umat Islam.

John L. Eposito mengkategorikan Salafiyah menjadi tiga kategori yakni:[16]

Kategori pertama, Salafiyah klasik dipelopori oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal (780-855) secara substansial terfokus pada prinsip: keutamaan teks wahyu di atas akal bahwa tidak ada kontradiksi antara akal dan Al Qur'an, Salafiyyah menganggap persoalan mazhab-mazhab teologi sebagai *bid'ah* sehingga Salafiyyah menolak *kalam,* ketaatan ketat pada Al Qur'an, Sunnah dan konsensus (*ijma'*) para *salafus shalih.*

Kategori kedua, Salafiyah pra-modern dikomandani oleh Muhammad Ibn Abdul Wahab (1703-1792) yakni pemikiran yang berkeinginan memurnikan semenanjung Arab dan praktek non Islam serta membangun Negara Islam yang meneladani negara yang didirikan Nabi.[17] Selain itu, titik tekan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab memiliki karakter khusus memerangi segala bentuk syirik dan khurafat, menyerukan kemurnian tauhid serta melindungi tauhid dari segala noda. Muhammad bin Abdul Wahab juga melakukan pembebasan *bid'ah* dan memerangi penafsiran terhadap ayat-ayat maupun hadits tentang berbagai sifat Allah.[18]

Kategori ketiga, Salafiyah modern dicetuskan oleh Jamaluddin Al Afghani (1839-1892) dan Muhammad Abduh (1849-1905) dan Rasyid Ridha. Untuk

---

[16] *Ibid.*, 101.
[17] *Ibid.*, 101.
[18] M. Imdadun Rahmat, *Arus*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyingkirkan umat Islam dari netralitas *taqlid* (imitasi buta) dan *jumud* (stagnasi berabad-abad) mengembalikan Islam dalam bentuk murni dan reformasi moral, budaya dan politik muslim.[19] Jamaluddin Al Afghani mengatakan kemurnian Islam terletak masa sahabat dan memerangi kolonialisme tetapi mengakui secara langsung terhadap IPTEK secara selektif dan kritis. Sedangkan Muhammad Abduh, khilafah Usmani harus tetap dijaga untuk persatuan umat Islam tetapi menekankan revolusi pendidikan. Dan Rasyid Ridha memandang khilafah Usmani tetap ditegakkan dan dikembangkan dengan syariat.[20]

Terma *Salaf* digunakan untuk menyebut para ulama' *Ahlussunnah Wal Jama'ah* sesudah tiga generasi yang diberkahi yang mengikuti jalan mereka dalam keyakinan dan perilaku. Menurut pendukung kaum Salafi, para ulama' tersebut adalah:[21]

Tabel 2.1 Daftar Ulama'-ulama' Salafi

NO.	NAMA ULAMA' SALAFI	TAHUN
1	Abu Hanifah	150
2	Al Awza'i	157
3	Al Tawn	161
4	Al Lais bin Sa'd	175
5	Malik bin Anas	179
6	Abdullah bin Al Mubarak	181
7	Sufyan bin 'Uyainah	198

[19]Muhammad Sa'i, *Gerakan*, 101.
[20] *Ibid.*
[21] M. Imdadun Rahmat, *Arus*, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	As Safi'i	204
9	Ishaq	238
10	Ahmad bin Hanbal	241
11	Al Bukhari	256
12	Muslim	261
13	Abu Dawud	275
14	Ibn Taimiyah	728
15	Al Zahabi	748
16	Ibn Al Qayyim	751
17	Ibn Kasir	774
19	Muhammad bin 'Abd Al Wahab	1206
20	'Abd Al Aziz bin Baz	-
21	Nasir Al Din Al Albani	-

H. Kelompok-kelompok Salafiyyah

Di kancah gerakan Islam Timur Tengah kontemporer, istilah *salafiyyun* adalah terminologi baru yang sulit diketahui kapan mulai tersebar penggunaanya. Sebelumnya, Salafi bukan merupakan mazhab sebagaimana Mazhab Hanafi dan juga kelompok terorganisir, seperti IM. Dia merupakan semangat penyebar ke dunia Islam semenjak *tabi'in* dan terkenal dengan sebutan *al salaf.*[22] Walaupun sepanjang sejarah, banyak perbedaan dan pertentangan teori dan praktik para pengikut Ahmad bin Hanbal dan pengikut lainnya.

[22] *Ibid.*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang-orang yang giat menyebarkan, membela, melahirkan pikiran-pikiran serta menerangkan ajaran-ajaran Salafiyyah dalam bidang akidah, fiqih maupun etika adalah Syekh Al Islam Ibnu Taimiyyah beserta alirannya. Dan di antara murid-muridnya yang menonjol adalah Imam Abu Abdullah bin Al Qayyim. Kedua syekh tersebut, meninggalkan literatur demi kepentingan kaun Salaf yang muncul dalam performa pembaruan dan reformasi.[23]

Di zaman modern, aliran Salafiyyah kembali muncul lewat tangan pembaruan Salafiyyah di jazirah Arab yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang karakter gerakannya memerangi segala bentuk syirik dan khurafat, menyerukan kemurnian tauhid serta melindungi tauhid dari segala noda. Walau pun pada perkembangannya, Muhammad bin Abdul Wahab berusaha membersihkan Islam dengan menerapkan literalisme yang ketat terkenal dengan pemberontakan-pemberontakan Wahabi.[24]

Wahabisme mendefinisikan ortodoksi secara sempit dan tidak toleran terhadap kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaanya. Pada akhir abad ke-18, keluarga Saud bergabung dengan gerakan Wahabi dan memberontak pada kekuasaan Usmaniyah di jazirah Arab. Pemberontakan ini sarat dengan pertumpahan darah, karena kaum Wahabi membantai muslim dan non-muslim tanpa pandang bulu. Tetapi, tahun 1818 Wahabi takluk pada tentara Mesir yang dipimpin oleh Muhammad Ali untuk meredamkan pemberontakan tersebut.

---

[23] *Ibid.*, 69.
[24] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, doktrin Wahabi dibangkitkan kembali oleh Abdul Aziz bin Saud awal abad ke-20, walau pun terbatas pengaruhnya hingga pertengahan tahun 1970-an.[25]

Wahabi menyatakan memiliki ketaatan harfiah pada teks agama Islam, Wahabi juga membuat klaim keotentikan yang dapat dipercaya saat identitas Islam diperebutkan. Selain itu, para penganjur Wahabisme menolak disebut atau dikategorikan sebagai pengikut tokoh tertentu bahkan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Para penganjur Wahabisme, menegaskan bahwa dirinya sekedar mematuhi ketentuan *salafus shalih* dengan demikian kaum Wahabi dapat memanfaatkan simbol dan kategori Salafisme.[26]

Ironisnya, gerakan Salafisme justru didirikan awal abad ke-20 oleh Al Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sebagai teologi yang berorientasi liberal.[27] Untuk merespon tuntutan modernitas, kaum muslim perlu kembali pada sumber murni Al Qur'an dan Sunnah dan mengaitkan diri pada penafsiran terhadap teks. Pemahaman yang terbuka pada pemahaman Barat dari Muhammad Abduh, mengakibatkan pembaruan Rasyid Ridha tidak dimanfaatkan oleh kaum Salafiyyah modern.

Kaum Salafiyyah kontemporer di Timur Tengah berwujud dalam beberapa kelompok yaitu:[28]

---

[25] *Ibid.*
[26] *Ibid.*, 71.
[27] *Ibid.*, 71.
[28] *Ibid.*, 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, salafiyyun sururiyyun yakni kelompok Salafiyyah politik dengan alasan universalitas risalah Islam lebih menaruh perhatian pada persoalan politik ketimbang akidah. Kelompok ini terpengaruh oleh pemikiran Ikhwanul Muslimin merujuk pada Muhammad Syurur Zein Al Abidin anggota IM yang memisahkan diri. Kelompok ini menentang keberadaan Amerika Serikat dan intervensinya pada perang Teluk ke-2 dan menentang politik Saudi Arabia yang terpaku pada banyak pertimbangan sehingga mereka banyak yang masuk penjara dan mempersempit ruang geraknya di negeri Raja Saud tersebut. Tokoh-tokoh kelompok ini antara lain Salman Al Audah, Safar Al Hawali, 'Aid Al Qarni kemudian dibebaskan dan terjadi rekonsialiasi dengan pemerintah.

Kedua, salafiyyun al abaniyyun yang mengikuti syekh Al Muhaddis Nasiruddin Al Albani. Mereka memerangi fanatisme mazhab fiqih dan menolak taqlid sekalipun dikalangan awam. Namun, saat bersamaan mereka justru mentaqlidkan semua pendapat syekh Al Muhaddis Nasiruddin Al Albani dan mentahbiskan diri sebagai "mazhab kelima".

Ketiga, salafiyyun al jamiyun (Salafiyun yang beringas), tokoh kelompok ini adalah Syekh Rabi' Al Madkhali. Kelompok ini gemar menyalahkan dan menyerang semua ulama' dan dai' yang bertentangan dengan mereka. Termasuk ulama' modern yang sering diserang antara lain: Hasan Al Banna, Sayyid Qutb, Syekh Muhammad Al Ghazali, Yusuf Al Qardawi, Muhammad 'Imarah, Fahmi Huwaidi, 'Ali Al Tantawi dsb. *Keempat, salafiyyun* pengikut syekh Abdurrahman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Khalik di Kuwait. *Kelima,* pengikut syekh Bin Bazz dan syekh 'Usaimin di Saudi Arabia.

I. Sejarah Kaum Salafi Indonesia

Persentuhan awal aktivis gerakan Salafi di Indonesia dengan pemikiran Salafiyyah terjadi pada tahun 1980-an bersamaan dengan dibukanya Lembaga Pengajaran Bahasa Arab (LPBA) di Jakarta, kemudian berubah nama menjadi LIPIA (Lembaga Ilmu Islam dan Sastra Arab) yang memberikan sarana untuk mengenal dan mendalami pemikiran-pemikiran para ulama' Salafi. LIPIA adalah cabang dari Universitas Muhammad Ibnu Saud di Riyadh. Awal tahun 1980 Imam Muhammad bin Saud University telah memiliki cabang di Djibouti dan Mauritania kemudian memutuskan membuka cabang ketiga di Indonesia.[29]

Upaya membuka cabang di Indonesia diawali dengan datangnya Syekh Abdul Aziz Abdullah Al Ammar ke Jakarta murid dari Syekh Abdullah bin Bazz yakni tokoh penting Salafi di seluruh dunia. Oleh Bin Bazz, Abdul Aziz disuruh bertemu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir menyambut baik rencana pendirian lembaga tersebut dan bersedia menjadi mediator dengan pemerintah. Selanjutnya, Natsir dan DDII memegang peran penting dalam rekruitmen mahasiswa-mahasiswa baru. Sejak berdirinya lembaga ini, sebagian besar

[29] *Ibid.*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa di LIPIA berasal dari lembaga pendidikan yang memiliki jaringan dengan DDII, misalnya PERSIS, Muhammadiyyah dan Al Irsyad.[30]

Lembaga baru ini mengikuti kurikulum lembaga induknya dan para pengajarnya ulama'-ulama' Salafi yang dikirim dari Saudi Arabia. Jaminan beasiswa yang besar mencakup buku, tempat tinggal dan kebutuhan membuat lembaga ini banyak diminati bahkan terdapat sejumlah mahasiswa melanjutkan studinya di program Master dan Doktor di Riyadh. Lulusan pertama lembaga ini adalah Abdul Hakim Abdat, Yazid Jawas, Faridh Okbah, Ainul Harits, Abu Bakar M. Altway, Ja'far Umar Thalib dan Yusuf Usman Baisa.[31]

Selain menerima pengajaran di Kampus, para mahasiswa mendapat materi kesalafian yang diselenggarakan di Asrama. Kelompok diskusi dirasakan lebih efektif karena bisa mengontrol langsung perilaku, ucapan dan bahan bacaan para mahasiswa. Jika mahasiswa dianggap menyimpang dari ajaran Salafi baik tindakan, pemikiran maupun buku-buku yang dibaca, senior Salafi langsung menegur dan meluruskan.[32] Pembentukan keyakinan, pandangan, sikap dan tindakan ajaran Salafi menjadi orientasi utama. Artinya mahasiswa ditekankan untuk memahami, menghafal dan menghayati materi kuliah yang berbasis paham Salafi. Tidak ada peluang perkembangan pemikiran, atmosfer doktrinasi lebih mewarnai perkuliahan. Tidak ada kesempatan menyangkal ajaran utama Salafi khususnya soal aqidah (teologi).

---

[30] *Ibid.*, 104.
[31] *Ibid.*, 104.
[32] *Ibid.*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gerakan Salafi telah tumbuh menjadi gerakan sosial dalam perkembangan gerakan Islam di Indonesia. Pasca Orba runtuh, gerakan Salafi menggeliat kurang lebih dua tahun (2000-2002), dibuktikan dengan berdirinya Forum Komunikasi Ahlusunnah Wal Jama'ah (FKAWJ). Forum ini memobilisasi massa dari Laskar Jihad. Laskar Jihad berperan penting dalam perkembangan Salafi di Indonesia. Laskar Jihad mendapat banyak dukungan dari masyarakat muslim Indonesia sebagai relawan untuk berjihad di Ambon dan Maluku. Tetapi, Laskar Jihad hanya bertahan dua tahun karena dibubarkan sehingga para relawan veteran jihad kembali ke daerah asal masing.masing.[33]

Ja'far Umar Thalib menjadi perhatian publik ketika mendirikan Laskar Jihad, sebuah kelompok yang beranggotakan para pemuda untuk *jihad fi sabilillah* ke Maluku dan Poso. Laskar Jihad bergerak di bawah naungan Forum Komunikasi Ahlusunnah Wal Jama'ah (FKAWJ) yang didirikan di Solo, 12 Februari 1998. FKAWJ dibentuk sebagai wujud keprihatinan lemahnya pemahaman umat Islam Indonesia terhadap ajaran Islam.[34] Ketika terjadi konflik di Maluku dan Poso, FKAWJ kemudian berperan sebagai payung mobilisasi masyarakat untuk berjihad ke daerah konflik tersebut melalui pembentukan Laskar Jihad.

Laskar Jihad menarik perhatian publik ketika mengadakan Tablig Akbar pada 6 April 2000 di Stadion Senayan Jakarta. Tablig Akbar ini dihadiri sekitar

---

[33] Ahmad Bunyan Wahib, *Gerakan Dakwah Salafiyah: Konflik Ideologis dan Sosial di Lombok Barat* (2006), 6.

[34] Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad : Islam, Militancy ang The Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (Utreecht: Faculteit der Letteren en International Institute for the Study of Islam in the Modern World, 2005), 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10.000 orang yang didominasi oleh para pemuda. Dalam Tablig Akbar ini, secara terbuka mengungkapkan adanya pembantaian massal yang dilakukan orang-orang Kristen kepada Muslim Maluku. Ja'far Umar Thalib menyerukan untuk berjihad membantu saudara muslim di Maluku. Untuk melegitimasi tindakan tersebut, dengan meminta fatwa kepada sejumlah tokoh Timur Tengah, seperti: Abd Al Razzaq ibn Abd Al Muhsin Al 'Abbad, Muqbil bin Hadi Al Wadi'i, Rabi' bin Hadi Al Madkhali, Salih As Suhaimiy, Ahmad Yahya ibn Muhammad An Najmi dan Wahid Al Jabiri. Para ulama' Salafi tersebut mengeluarkan fatwa wajibnya berjihad ke Maluku.[35]

Selain terlibat dalam konflik Maluku, Laskar Jihad juga mengirim 700 relawan ke Poso, Sulawesi Tengah. Laskar Jihad memandang telah terjadi pembantaian massal yang dilakukan penduduk lokal non-muslim kepada para pendatang yang mayoritas muslim. Di Balik itu, Laskar Jihad menilai ada konspirasi Zionis dan Kristian Internasional dalam konflik Poso. Selain di Poso, Laskar Jihad berusaha untuk terlibat dalam konflik di Aceh yang melibatkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan konflik Papua (Kelompok Papua Merdeka). Namun, usaha ini mengalami kegagalan karena penduduk lokal menolak intervensi orang luar.[36]

---

[35] Laskar Jihad mendirikan pusat pelatihan para militer yang bertempat di Bogor. Pelatihan para militer ini dikoordinasikan oleh alumni anggota resimen mahasiswa yang bergabung dalam dakwah Salafi dan Veteran perang Afganistan, Moro dan Khasmir. Mereka adalah para anggota Salafi yang memahami teknik ketentaraan. Pelatihan tersebut juga diduga melibatkan beberapa anggota militer yang bertugas sebagai instruktur. Lihat Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad,* 117-118.

[36] *Ibid.*, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterlibatan Laskar Jihad dalam berbagai konflik komunal di Indonesia, satu sisi telah menunjukkan gerakan Salafi sebagai gerakan sosial Indonesia yang agresif dan berhasil memobilisasi massa. Di sisi lain, munculnya Laskar Jihad menimbulkan ketegangan antara kaum Salafi sendiri bahkan antar gerakan Islam lainnya. Sebagian masyarakat menuduh Laskar Jihad sebagai agen jaringan Al Qaeda. Ada juga yang beranggapan bahwa Laskar Jihad adalah kepanjangan tangan yang dimanfaatkan dan bekerja untuk elit pemerintah.[37] Hal ini menjadi tekanan tersendiri bagi Laskar Jihad.

Tekanan yang serius adalah berubahnya kebijakan pemerintah dalam menangani konflik. Pemerintah berusaha menangani konflik dengan mengirim tentara dan tokoh politik ke daerah konflik. Kebijakan tersebut membuat lahan kerja Laskar Jihad diambil alih oleh pemerintah. Masa pemerintahan Megawati menekankan cara-cara diplomatik dalam mengatasi konflik di Ambon dan Poso serta peringatan agar kelompok para militer yang terlibat konflik dibubarkan dan membawa persoalan ke meja perundingan.[38]

Adanya tekanan tersebut berakibat peranan Laskar Jihad semakin berkurang dan memaksa keluar dari daerah konflik sehingga mengakibatkan Laskar Jihad kehilangan peran pentingnya masyarakat. Pada tanggal 12 Oktober 2002, Laskar Jihad dibubarkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Rabi' bin Hadi Al Madkhali (tokoh Salafi Yaman) panutan aktivis Salafi di Indonesia. Alasan

---

[37] *Ibid.*, 236.
[38] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembubaran karena Laskar Jihad menyimpang dari tujuan semula untuk berjihad membela kaum muslimin di Maluku. Selain itu, Ja'far Umar Thalib menambahkan bahwa situasi di Maluku telah pulih sehingga Laskar Jihad tidak diperlukan lagi dalam penanganan konflik.[39]

Peristiwa tersebut adalah tanda-tanda perpecahan Laskar Jihad. Beberapa tokoh FKAWJ mulai merasakan langkah Ja'far Umar Thalib telah menyimpang dari tujuan semula, seperti: Abu Munzir Zul Akmal dan Abu Muhammad Zulkarnain. Kekecewaan bertambah ketika Ja'far Umar Thalib muncul di TV bersama politisi dan pemimpin organisasi Islam yang berdakwah secara *hizbiyyah.* Walaupun awalnya Ja'far Umat Thalib berusaha mempertahankan Laskar Jihad. Namun beberapa hari setelah peledakan bom Bali, Jafar Umar Thalib merubah pendiriannya dan mengumumkan pembubaran Laskar Jihad. Hal tersebut mengakibatklan Ja'far banyak ditinggalkan oleh pengikutnya.[40]

J. Definisi Konsep Demokrasi

Guna mendapat gambaran tentang demokrasi maka perlu pendefinisian konsep demokrasi secara jelas, sekalipun konsep demokrasi tidak mudah didefinisikan. Realitasnya bahwa demokrasi adalah konsep yang secara "secara esensial selalu diperebutkan maknanya". Demokrasi secara etimologi berasal dari kata "*Demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*Cratein*" yang

[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sisitem pemerintahannya, kedaulatannya berada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.[41]

Demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem politik yang didasari oleh aturan yang dikuasakan kepada pemerintah, yang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan kepada kehendak sebagian besar anggota masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Demokrasi didasarkan pada aturan mayoritas tetapi dengan melindungi hak-hak kelompok minoritas. Hak-hak yang melekat dalam sistem demokrasi adalah persamaan di depan hukum, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan perlindungan terhadap perlakuan dan penahanan yang sewenang-wenang.

Demokrasi berpedoman pada prinsip "*rule by the people*" yang prinsipnya adalah demokrasi perwakilan merupakan kontrol rakyat terhadap penetapan kebijakan, persamaan kedudukan dalam praktik politik, kebebasan politik, dan prinsip demokrasi mayoritas. Bentuk-bentuk demokrasi antara lain adalah demokrasi radikal, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi sosialis, dan demokrasi majemuk.

Pembahasan tentang demokrasi adalah pengakuan dan penegasan tentang hak-hak warga negara dalam pengelolaan negara. Prinsip dasar dari demokrasi adalah puncak kekuasaan terletak pada kehendak rakyat. Namun dalam prakteknya bagaimana kehendak rakyat ini direpresentasikan, banyak mekanisme dapat

[41] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2007), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan. Variasi dalam mengelola "kehendak rakyat" ini melahirkan bentuk-bentuk demokrasi, seperti yang dipaparkan dalam tabel di atas. Bentuk-bentuk demokrasi ini merupakan bentuk ideal, yang dalam praktiknya masih terdapat beberapa pengecualian, seperti di Indonesia dengan "Demokrasi Pancasila"nya.

Namun, suatu bentuk ideal harus dapat didefinisikan agar dapat dioperasionalisasikan ke dalam kehidupan nyata. Beberapa indikator dan prasyarat praktik demokrasi, mutlak diperlukan analisis yang lebih tajam. Prasyarat ini merupakan perwujudan dari keharusan menghormati hak-hak warga negara (hak-hak asasi politik) dan dapat menunjukkan bagaimana aplikasi demokrasi dalam sebuah negara. Tentunya, penerapan demokrasi juga harus dilihat sebagai suatu proses sehingga ada kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan demokrasi, seperti pertumbuhan ekonomi, komitmen elit politik dan manajemen institusi (kelembagaan) politik walau belum sepenuhnya menjamin pertumbuhan demokrasi itu sendiri.

Sedangkan, pendefinian konsep demokrasi oleh Masdar Hilmy dalam analisis kerangka konseptual bukunya *"Teologi perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonsia Pasca Orde Baru"* diklasifikasikan menjadi dua yaitu demokrasi institusional atau demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.

Pertama, Demokrasi institusional atau demokrasi prosedural. Masdar Hilmy menggunakan definisi David Beetham yakni sebuah modus pembuatan keputusan tentang sejumlah peraturan dan kebijakan secara kolektif bersifat mengikat rakyat menjalankan kontrolnya. Dalam menjelaskan demokrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedural Masdar Hilmy menggunakan istilah Robert Dahl sebagai bentuk pemerintahan dengan kriteria sebagai berikut: [42]

Pertama, kompetisi yang bebas dan periodik sekurang-kurangnya dua calon untuk membuat keputusan secara efaktif, dengan hasil akhir pemerintahan yang damai. *Kedua,* keberadaan tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam pemilihan umum. Seluruh populasi dewasa diizinkan mengikuti pemilihan umum (hak memilih bersifat universal). *Ketiga,* terdapat jaminan hak asasi manusia dan kebebasan sipil, semacam kebebasan berekspresi, kebebasan media dan kebebasan untuk bergabung dan mendirikan partai poltik. *Keempat,* pemimpin dianggap akuntabel secara publik selama memegang kantor pemerintahan maka dibutuhkan sarana memecat pemimpin jika melanggar hukum.

Kedua, demokrasi juga melingkupi nilai-nilai substantif seperti kemerdekaan (*liberty*), kebebasan (*freedom*), kesederajatan (*equality*), keadilan (*justice*), toleransi dan penegakan hukum. Kemerdekaan dan kesederajatan menjadi kunci dasar dalam demokrasi. Kriteria dasar kemerdekaan adalah memerintah dan diperintah secara bergantian dan hidup sesuai dengan pilihannya. Kesejahteraan numerik menjadi prinsip efektifitas pemerintahan meliputi partisipasi dibayar secara finansial sehingga warga negara tidak menderita akibat keterlibatan politik, warga negara memiliki hak suara yang sama dalam kekuasaan,

---

[42] Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orba* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peluang yang sama untuk memasuki kantor pemerintahan. Sederhananya, kesederajatan adalah pijakan moral dan praktis dari kemerdekaan.[43]

Kemerdekaan dan kesederajatan merupakan unsur penting bagi demokrasi, tetapi ketaatan pada otoritas publik dan hukum lebih diutamakan. Jika gagasan demokrasi adalah kebebasan dan otonomi maksimal, maka konsep pemerintahan perlu melibatkan batasan-batasan terhadap kebebasan. Aturan dan hukum harus ditegakkan di atas pijakan semangat publik, kehidupan privat harus tersubordinasikan kepada urusan-urusan publik. "Publik dan Privat" pada hakekatnya saling berkaitan, sekalipun toleransi juga tidak kalah penting sehingga masyarakat dapat menikmati hidupnya "dengan caranya sendiri". Prinsip toleransi melibatkan batasan-batasan diri terhadap segala bentuk reaksi spontan dengan menjaga keseimbangan antara wilayah "Publik dan Privat".

Berpijak pada definisi konsep demokrasi sebagaimana tersebut di atas, skripsi ini menggunakan demokrasi prosedural dan esensial sebagai kerangka konseptual dan teoritik untuk menganalisis perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Indonesia. Jika gagasan demokrasi prosedural terkait pemilihan umum dan politik elektoral semacam pemilihan pemimpin, peran partai politik dan antusiasme gender dalam politik, sedangkan demokrasi substansial terkait dengan kebebasan sipil semacam kebebasan beragama, kebebasan pers dan HAM.

---

[43] *Ibid.*, 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia pemilu dinilai oleh banyak kalangan masih bersifat seremonial ditunjukkan dengan adanya *money politik*, kampanye-kampanye dengan mengumbar janji dan pemilihan pemimpin bukan atas pertimbangan agama, tetapi kegantengan, uang dll. Hal ini lah yang masih dinilai pemilu di Indonesia adalah demokrasi prosedural. Makna demokrasi substantif dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dengan dasar kebebasan beragama sehingga muncul partai-partai berbasis agama, misal adanya partai dari kalangan umat Islam dan Krinten bahkan muncul partai-partai nasionalis. Kebebasan pers terkadang diperalat oleh partai politik dengan kecenderungan menyajikan berita salah satu calon Presiden, Kepala Daerah dan Walikota.

Rakyat memerintah dirinya sendiri artinya warga negara tidak hanya menerima atau menolak hasil-hasil keputusan pemilihan umum, melainkan juga melaksanakan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah yang terbentuk dari pemilihan umum. Warga negara dalam keputusan-keputusan pemilihan umum memiliki kebebasan sehingga rakyat berdaulat. Selama rakyat memiliki kedaulatan, "bebas" perlu mengendalikan arah pemerintahan yang terbentuk dari pemilihan umum.

Dewasa ini, tidak ada kehendak rakyat yang tunggal di dalamnya kehendak pihak yang memerintah menjadi identik dengan kehendak pihak yang diperintah. Bagaimana cara rakyat mengendalikan pemerintahan, jika kehendak-kehendak individual saling bertentangan satu sama lain. Kontrol atas pemerintah dilaksanakan secara tidak langsung lewat kekuasaan opini publik. Akan tetapi, dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana ukuran bahwa sebuah opini publik mencerminkan kepentingan semua orang dan tidak mengabaikan atau menindas kaum minoritas.

K. Teori Demokrasi

Secara garis besarnya, aliran-aliran tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yakni kaum Islamis (lebih dikenal dengan Islam fundamentalis) dan Islam moderat. Menurut Masdar Hilmy bahwa konsep demokrasi dalam Islam di Indonesia masih menimbulkan perdebatan yang bersifat multiversi sehingga muncul dua aliran dalam Islam yaitu:

Pertama, Kaum Islamis (fundamentalis) yaitu kaum yang menolak demokrasi (isu-isu pluralisme, gender dll) karena segala sesuatu harus kembali pada syari'at Islam. Demokrasi dianggap sebagai penghancur pandangan dunia muslim dan menentang konsep Negara Islam (*khilafah*). Kaum Islam Fundamentalis dibagi menjadi dua yaitu:

a) Islamis Utopian adalah kaum Islamis yang memiliki ideologi politik membentuk ulang masyarakat berdasar hukum Islam dengan cara radikal tetapi tanpa kekerasan.
b) Islamis Melioris adalah kaum Islamis yang mengambil jalan tengah dengan mengintervensi kondisi sosial politik serta memaksakan ajaran Islam secara murni untuk diterima masyarakat.[44]

---

[44] *Ibid.*, 159-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Kaum Islam Moderat adalah kaum Islam yang menerima demokrasi karena Islam *Rahmatan Lil 'alamin*, Islam fleksibel dan relevan dipertemukan dimana saja. Islam Moderat dibagi menjadi dua yaitu:

a) Moderat Tradisionalis yakni mereka yang menerima perkembangan zaman tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalis, misal asimilasi kebudayaan Hindu dan Islam, contoh NU.
b) Moderat dan Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan secara langsung, contoh Muhammadiyah.

Jadi, klasifikasi Masdar Hilmy di atas untuk mambaca respon kaum Salafi terhadap demokrasi yakni menerima, menolak demokrasi atau menerima demokrasi dengan catatan (konsekuensi) tertentu. Secara konseptual, kaum Salafi menyatakan bahwa demokrasi ditentukan oleh suara mayoritas. Sedangkan, suara mayoritas tidak menjamin terpilihnya pemimpin yang memenuhi kriteria dalam Islam. Dan kaum Salafi juga menyatakan *hizbiyyah* adalah cara baru yang tidak ada dasar hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Letak Geografis

Batas wilayah kelurahan Jingglong, kecamatan Sutojayan, kabupaten Blitar adalah :[1]

Sebelah Utara	: Kelurahan Jegu
Sebelah Timur	: Desa Kaulon dan Desa Margomulyo
Sebelah Selatan	: Kelurahan Sukorejo dan Kelurahan Kalipang
Sebelah Barat	: Kelurahan Kalipang.

Luas wilayah Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan 466, 65 Ha, terinci sebagai berikut :[2]

Tanah sawah	: 221,26 Ha,
Pekarangan	: 114, 15 Ha,
Tegal	: 128, 84 Ha,
Kuburan	: 0,35 Ha,
Lapangan	: 0,42 Ha,
Sekolah dan Kantor Desa	: 1,63 Ha.

[1] Sumber Laporan Evaluasi Desa atau Kelurahan Berhasil Tingkat Kabupaten Blitar oleh Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, 3.

[2] *Ibid*, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan penduduk pada tahun 2009 adalah 5693 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :[3]

Jumlah penduduk laki-laki : 2521 jiwa.

Jumlah penduduk perempuan : 3172 jiwa.

Jumlah kepala keluarga : 1517 jiwa.

Jumlah RT dan RW : 25 dan 5.

Jumlah kepala lingkungan : 2.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur :[4]

No.	INDIKATOR	JUMLAH	
		TH 1	TH 2
1	0-12 ulan	83 Orang	95 Orang
2	>1 - <15 tahun	284 Orang	225 Orang
3	>5 - <7 tahun	163 Orang	165 Orang
4	>7 - <15 tahun	872 Orang	888 Orang
5	>15 - <56 tahun	3.475 Orang	3.472 Orang
6	>56 tahun	863 Orang	778 Orang

2. Aspek Pendidikan

Lembaga pendidikan yang berada di Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan sepanjang sejarah telah mengukir prestasi cemerlang dapat terlihat dari piala yang ada di lembaga tersebut. Selain itu, penduduk kelurahan

[3] *Ibid*, 2.
[4] *Ibid*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jingglong memiliki kepedulian di bidang pendidikan. Lewat Komite Sekolah masyarakat berkomitmen meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan.

Tabel 3.2 Tingkat Perkembangan Pendidikan:[5]

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH1	TH2
1	Pendidikan Penduduk Usia 15 tahun ke atas	Jumlah Penduduk Buta Huruf	12 Orang	12 Orang
		Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD/Sederajat	364 Orang	376 Orang
		Jumlah Penduduk Tamat SD/Sederajat	1.981 orang	1.993 orang
		Jumlah Penduduk Tamat SLTP/Sederajat	387 Orang	419 Orang
		Jumlah Penduduk Tamat SLTA/Sederajat	102 Orang	112 Orang
		Jumlah Penduduk Tamat Diploma	13 Orang	15 Orang
		Jumlah Penduduk Tamat S1	85 Orang	92 Orang
2	Wajib Belajar 9 Tahun dan Putu Sekolah	Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun	804 Orang	819 Orang
		Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun masih Sekolah	804 Orang	819 Orang
		Jumlah penduduk Usia 7-15 Tahun putus Sekolah	-	-
3	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah Perguruan Tinggi	-	-
		Jumlah SLTA/Sederajat	-	-
		Jumlah SLTP/Sederajat	-	-
		Jumlah SD/Sederajat	4 buah	4 buah
		Jumlah Kelompok Belajar	15 buah	15 buah
		TPA	2 buah	2 buah
		Diniyah	13 buah	13 buah

[5] *Ibid*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aspek Kesehatan

Dalam pembangunan Kesehatan di Kelurahan Jingglong banyak hal yang menonjol terbukti sebagai berikut :

Pertama, program Posyandu Plus dimana selain diadakan penimbangan, imunisasi masih terdapat kegiatan MPASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu). *Kedua,* tidak ditemukan anak kurang energi protein (KPE). *Ketiga,* kegiatan pemeriksaan rutin bagi ibu hamil di Posyandu dan Poskesdes serta penyuluhan-penyuluhan kesehatan lain. *Keempat,* pelaksanaan PIN sejak tahun 2005-2008 dengan hasil 100% setiap pelaksanaannya.

Tabel 3.3 Tingkat Perkembangan Kesehatan Masyarakat:[6]

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH1	TH2
1	Kematian Bayi	Jumlah Bayi Lahir	83 Orang	95 Orang
		Jumlah Bayi Mati	1 Orang	-
2	Gizi dan Kematian Balita	Jumlah Balita	380 Orang	381 Orang
		Jumlah Balita Gizi Buruk	-	-
		Jumlah Balita Gizi Baik	301 Orang	334 Orang
		Jumlah Balita Mati	-	-
3	Cakupan Imunisasi	Imunisasi Polio	91 Orang	99 Orang
		Imunisasi DPT-1	81 Orang	96 Orang
		Imunisasi BCG	86 Orang	94 Orang
4	Cakupan Pemenuhan	Total RT dapat Air Bersih	1.574 RT	1.594 RT

[6] *Ibid,* 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Kebutuhan Air Bersih	Pengguna Sumur Gali	1.582 RT	1.590 RT
6	Kepemilikan Jamban	Total RT mempunyai Jamban/WC	1.285 RT	1.299 RT
		Total RT Tidak mempunyai Jamban/WC	317 RT	306 RT
		Pengguna MCK	1.104 RT	1.138 RT
7	Perbaikan Gizi	Jumlah Bayi dan Balita seluruhnya	380 Orang	381 Orang
		Jumlah Bayi Balita punya KMS	380 Orang	381 Orang
		Jumlah Bayi Balita datang ke Posyandu	314 Orang	227 Orang
		Jumlah Bayi Balita yang naik Timbangan	275 Orang	278 Orang
8	Jumlah RT Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah Tangga (RT) seluruhnya	1450 RT	1605 RT
		Jumlah RT yang disurvei	1160 RT	1605 RT

4. Aspek Ekonomi

Di Kelurahan Jingglong hampir tidak ditemukan pengangguran selayaknya daerah lain. Hal tersebut karena adanya kegiatan ekonomi seperti *home industri,* bengkel, meubel dan peleku ekonomi lain yang cukup produktif. Sektor pertanian dapat memanfaatkan lahan pertanian yang ada di Kelurahan Jingglong. Di sektor koperasi ada kegiatan simpan pinjam seperti, simpan pinjam khusus ibu-ibu PKK, Dasa Wisma dan simpan pinjam P2KP yang berjalan dengan lancar.

PKK berperan untuk membantu tugas-tugas pemerintahan melalui program yang tertuang pada kelompok kerjanya dikenal dengan Pokja 1s/d 4. Melalui kelompok kerja tersebut, ibu-ibu PKK menuangkan programnya untuk membangkitkan, mengembangkan dan memberdayakan peran ibu-ibu rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga menuju rumah tangga sehat dan sejahtera. Bentuk kegiatan binaan PKK seperti Jimpitan, simpan pinjam, Yasinan dll.

Tabel 3.4 Tingkat Perkembangan Ekonomi Masyarakat:[7]

No.	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JUMLAH	
			TH1	TH2
1	Pengangguran	Jumlah Penduduk Usia Kerja 15-56 tahun	3.486 Orang	3.507 Orang
		Jumlah Penduduk Usia 15-56 tahun tidak Bekerja	12 Orang	8 Orang
		Penduduk Perempuan Usia 15-56 tahun menjadi Ibu Rumah Tangga	1.094 Orang	1.103 Orang
		Penduduk Usia >15 tahun cacat sehingga tidak dapat Bekerja	16 Orang	15 Orang
2	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah Keluarga	1.724 KK	1.780 KK
		Jumlah Keluarga Prasejahtera	224 KK	296 KK
		Jumlah Keluarga Sejahtera 1	241 KK	182 KK
		Jumlah Keluarga Sejahtera 2	375 KK	401 KK
		Jumlah Keluarga Sejahtera 3	866 KK	882 KK
		Jumlah Keluarga Sejahtera 3 Plus	18 KK	19 KK
3	Kelembagaan Ekonomi	pasar	Tidak ada	Tidak ada
		koperasi	Tidak ada	Tidak ada
		BUMDes	Tidak ada	Tidak ada
		Toko/kios	9 buah	14 buah
		Warung makan	4 buah	4 buah
		Angkutan	1 buah	1 buah
		Pangkalan ojek, becak	3 buah	3 buah
4	Sumber Pendapatan	Pertanian	7.134.250.000	7.229.250.000
		Kehutanan	450.140.000	450.275.000

[7] Ibid, 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Perkebunan	205.000.000	215.000.000
		Peternakan	1.343.000.000	1.345.000.000
		Perikanan	695.000.000	715.000.000
		perdagangan	1.540.000.000	1.625.000.000
		Jasa	335.000.000	345.000.000

5. Aspek Politik

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di segala bidang, masyarakat Kelurahan Jingglong selalu aktif keikutsertaaanya, baik berupa moril maupun materiil terlihat dari peningkatan bagunan fisik maupun non fisik. Masyarakat Jingglong juga berperan aktif dalam pemilihan umum baik Pemilihan Legisletif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada dengan jumlah rata pemilih mencapai 91%.

Dalam rangka melaksanakan tugas, aparat pemerintah di Kelurahan Jingglong berpedoman pada TUPOKSI (Tugas Pokok Fungsi) masing-masing bidang serta tetap melakukan prinsip-prinsip kebersamaan, partisipasi dan terbuka mengingat masyarakat era reformasi selalu menekankan transparansi. Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Jingglong baik LPPK maupun FMK dapat meleksanakan tugasnya dengan baik. Setiap rencana pembangunan dimusyawarahkan dan diputuskan melalui forum LPPK sebagai perencana dan pelaksana pembangunan sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Majelis Taklim Kaum Salafi di Kabupaten Blitar

1. Keadaan Ustadz dan Jama'ah Salafi

Ustadz kaum Salafi di Kabupaten Blitar yakni Ustadz Muhammad Ubaidillah alumni Darul Hadits Yaman. Beliau adalah pusat pengajar bagi kaum Salafi untuk memahami dan mengamalkan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, istri Ustadz Muhammad Ubaidillah yakni Ummu Muhammad alumni Kimia, Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan pernah menimba ilmu di Ihya' Us Sunnah, Yogyakarta juga mengajar jam'ah-jama'ah perempuan tidak lain adalah para istri dari kaum Salafi.[8]

Jama'ah-jama'ah Salafi jumlahnya tidak dapat dipastikan, karena informan yang enggan memberikan informasi. Jumlah jama'ah yang datang pada suatu Majelis Taklim adalah jama'ah pendatang dari berbagai daerah yang berminat untuk menambah pengetahuan agama secara murni sesuai *manhaj* Salafi. Para Jama'ah tersebut di atas, sekaligus terdaftar sebagai informan yakni:

Tabel 3.5 Daftar Informan

NO.	NAMA	ALAMAT	PROFIL
1	Abu Muhammad Ubaidillah	Jingglong, Kecamatan Sutojayaan, Kabupaten Blitar	Ustadz Salafi
2	Lutfie Mahendra	Lodoyo, Kecamatan	Jama'ah Salafi

[8] Abu Muhammad Ubaidillah dan Ummu Muhammad, Ustadz Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 15 Januari 2011 jam 09.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Sutojayan, Kabupaten Blitar	
3	Debbi Ariffudin	Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Jama'ah Salafi
4	Baharuddin Ramadhani Wicaksono	Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Jama'ah Salafi
5	D. Widodo E. S	Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Jama'ah Salafi
6	S. Fauziah	Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Jama'ah Salafi
7	Agung Dwi Nugroho	Blitar dan Malang	Jama'ah Salafi
8	Irwan	Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Jama'ah Salafi
9	Ibnu Muslim	Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Jama'ah Salafi
10	Abu Hakim	Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Jama'ah Salafi
11	Abu Fira	Lodoyo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Jama'ah Salafi
12	Harianto	Lodoyo, Kecamatan	Jama'ah Salafi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Sutojayan, Kabupaten Blitar	

Majelis Taklim wilayah Kabupaten Blitar tersebar di berbagai daerah yakni: Majelis Taklim Masjid Al Furqan (Desa Bagelan, sebelah Timur SPBU Srengat, Blitar), Masjid At Taqwa (sebelah Timur SLTP 2 Sreangat, Blitar), Masjid Nurul Iman (sebelah Timur Perempatan Kanigoro, Blitar) dan rumah Abu Muhammad Ubaidillah (Ustadz Salafi) sebagai Majlis Taklim keluarga. Jadwal pengajian Majelis Taklim masing-masing daerah adalah sebagai berikut:[9]

Tabel 3.6 Jadwal Majelis Taklim Salafi di Kabupaten Blitar

NO.	MATERI	WAKTU	LOKASI	PENGAJAR
1	Tafsir (Juz Amma)	Sabtu, 20.00	Masjid Al Furqan, Sebelah Timur SPBU Bagelan, Blitar	Ustadz Abu Muhammad Ubaidillah
2	Aqidah (Manhaj Firqatun Najiyah)	Ahad, 20.00	Masjid At Taqwa, Sebelah Timur SLTP 2 Srengat, Blitar	Ustadz Abu Muhammad Ubaidillah
3	Hadits (Syarah Hadits Arbain Nawawi)	Selasa, 20.00	Masjid Nurul Iman, Sebelah Timur Perempatan Kanigoro, Blitar	Ustadz Abu Muhammad Ubaidillah

[9] http://www.salafyblitar.blogsome/ dan Abu Muhammad Ubaidillah, Ustadz Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 15 Januari 2011 jam 09.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Taklim kaum Salafi juga terletak di Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, tepatnya di rumah Ustadz Muhammad Ubaidillah terdiri dari Taklim bapak-bapak dan ibu-ibu dengan waktu yang berbeda. Artinya, Majelis Taklim bapak-bapak diajar oleh Ustadz Muhammad Ubaidillah pada malam hari. Sedangkan, Majelis Taklim ibu-ibu diajar oleh Ummu Muhammad (istri Ustadz Ubaidillah) pada siang hari sesuai waktu yang disepakati oleh para jama'ah via telepon seluler atau SMS. Jadwal pengajian Majelis Taklim keluarga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jadwal Majelis Taklim Salafi di Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar

NO.	MATERI	WAKTU	LOKASI	PENGAJAR
1	Nahwu Sorof	Sabtu, 13.00	Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Ustadz Abu Muhammad Ubaidillah
2	Kaifa Nurabbi Auladana	Sabtu, 14.00	Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Ummu Muhammad Ubaidillah
3	Aqidah	Rabu, 20.00	Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Ustadz Abu Muhammad Ubaidillah
4	Fiqih	Kamis, 21.00	Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Ustadz Abu Muhammad Ubaidillah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Tajwid	Jum'at, 21.00	Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar	Ustadz Abu Muhammad Ubaidillah

2. Perkembangan Dakwah Kaum Salafi

Dakwah Salafi di Kabupaten Blitar diawali dari *person to person* yang tertarik, kemudian tersebar melalui saudara, teman, tetangga sehingga berkembang hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. Banyaknya kaum muslimin yang berminat untuk menuntut ilmu, maka kaum muslimin meminta adanya majelis taklim dengan memanfaatkan tempat yang ada. Tempat dakwah awalnya hanya dari rumah ke rumah kaum muslimin yang membutuhkan ilmu Islam secara benar.[10] Hal tersebut juga dibenarkan oleh Abu Hakim, ketika ditanya mengenai sejarah masuknya ajaran Salafi di Kabupaten Blitar, dengan penegasan sebagai berikut:

> Diawali adanya Kajian Islam Ilmiah yang disampaikan oleh Ustadz Ubaid yang menjelaskan berbagai permasalahan agama secara ilmiah dengan dalil-dalil Al Qur'an dan Sunnah yang diuraikan secara gamblang dan terinci, berhasil menyita perhatian kaum muslimin. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama muncullah majelis-majelis taklim Salafi yang tersebar di berbagai tempat di Blitar.[11]

Kaum Salafi di Kabupaten Blitar berbeda dengan Salafi di Kota Kediri. Kaum Salafi Di Kota Kediri memiliki pondok pesantren yang *notabene* dakwah

[10] Abu Muhammad Ubaidillah, Ustadz Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 15 Desember 2010.

[11] Abu Hakim, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 20.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salafi di Kabupaten Blitar lebih tua dari pada di Kota Kediri. Abu Muhammad Ubaidillah mengatakan sebagai berikut:

> Tahun 2002 saya sudah memulai berdakwah di Kabupaten Blitar pasca pulang belajar dari Yaman. Maka tahun tersebut tidak bisa dikatakan atau diklaim sebagai tahun berdiri. Hakekatnya setiap muslim berhak untuk berdakwah mengajak seluruh kaum muslimin mengamalkan Islam secara benar.[12]

Selanjutnya, Abu Hakim, saat ditanya mengenai perkembangan kaum Salafi di Kabupaten Blitar mengatakan:

> Perkembangan dakwah Salafi di Blitar cukup baik. Majelis taklim berkembang dan tersebar di berbagai tempat diikuti oleh berbagai golongan usia, status dari berbagai latar belakang golongan, baik laki-laki maupun perempuan.[13]

Artinya perkembangan dakwah Salafi semakin bertambah besar, tetapi tidak dibatasi dengan aturan atau struktur organisasi formal. Hal ini ditegaskan oleh Abu Muhammad Ubaidillah yakni:

> Kaum Salafi bukan merupakan organisasi maka tidak dapat dipastikan dan dikatakan kapan tahun berdirinya. Kaum Salafi di Kabupaten Blitar tidak mempunyai pondok pesantren atau yayasan seperti di kota atau kabupaten lain. Salafi ingin mengajak seluas-luasnya pada masyarakat untuk memahami agama secara benar. Artinya dakwah tersebut adalah milik kaum muslimin bukan inklusifisme kelompok atau fanatisme golongan untuk kembali pada Al Qur'an dan Sunnah. Salafi tidak pernah membentuk suatu organisasi formal untuk menangani dakwah tersebut. Kesadaran masing-masing kaum muslimin untuk memenuhi kebutuhan mereka karena membutuhkan ilmu sehingga tidak ada yayasan atau pondok yang menaungi kaum Salafi di Kabupaten Blitar dan dakwahnya pun berjalan dengan baik.[14]

---

[12] Abu Muhammad Ubaidillah, Ustadz Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 15 Desember 2010.

[13] Abu Hakim, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 20.00.

[14] Abu Muhammad Ubaidillah, Ustadz Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 15 Desember 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, dakwah Salafi di Kabupaten Blitar dilakukan dengan cara mendirikan taklim dan terbukti dakwah Salafi tersebar hampir diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. Abu Muhammad Ubaidillah menilai:

> Selama ini masjid-masjid Islam banyak tetapi karena keterbatasan ilmu justru masjid-masjid tersebut digunakan untuk menegakkan kelompok-kelompok tertentu untuk menunjukkan eksistensinya.[15]

Melihat realitas tersebut, kaum Salafi mengambil alih masjid-masjid tersebut untuk menggunakannya sebagai tempat dakwah dan belajar serta mengamalkan Islam sesuai Al Qur'an dan Sunnah. Masjid-masjid yang dinilai kaum Salafi tidak ditegakkan berdasarkan ajaran Islam, setelah kaum Salafi di Kabupaten Blitar faham ilmu dan kaum Salafi tersebut menegakkan apa yang dipahami dari ajaran Islam maka tidak perlu mendirikan masjid-masjid sendiri. Artinya masjid-masjid yang ada dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan dikembangkan sesuai kewajiban umat muslim untuk mengajak pada Islam yang benar sesuai Al Qur'an dan Sunnah.

Perkembangan dakwah yang tersebar melalui masjid-masjid hingga hampir seluruh kecamatan bahkan Blitar, tetapi masih menemukan hambatan-hambatan dalam dakwah Salafi. Ada sebagian tokoh-tokoh Islam yang khawatir lahan dakwahnya dikuasai kaum Salafi sehingga memicu konflik ideologis maupun batin. Hal ini disampaikan Abu Hakim sebagai berikut:

> Hambatan lebih banyak ditimbulkan oleh tokoh-tokoh kaum muslimin yang khawatir kehilangan status ketokohannya dan berbagai bentuk

---

[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kepentingan-kepentingan pribadi dengan menyebarkan berbagai fitnah dan berita bohong untuk menjauhkan umat dari penjelasan-penjelasan agana yang ilmiah. Sehingga membuat umat ini skeptis, apriori serta berburuk sangka kepada dakwah Salafi sebelum mereka benar-benar memahami.[16]

Abu Muhammad Ubaidillah, selaku Ustadz Salafi di Kabupaten Blitar, mengatakan sebagai berikut:

> Di Kabupaten Blitar, kaum Salafi tidak memiliki koordinator yakni benar-benar kesadaran untuk menunaikan apa yang menjadi kebutuhan setiap kaum muslim.[17]

Berdasarkan deskripsi di atas, maka tujuan dakwah kaum Salafi adalah mendapat pahala dari sisi Allah dengan tanpa meminta imbalan apapun dari para jama'ah. Bagi kaum muslimin yang ingin mengikuti taklim, maka tidak ada pemberitahuan atau undangan hanya kesepakatan jadwal waktu dan tempat taklim. Jumlah jama'ah taklim tidak dapat dipastikan karena taklim diselenggarakan berdasarkan kedekatan rumah dari jama'ah taklim. Bagi jama'ah taklim yang rumahnya jauh, dipersilahkan mengikuti taklim jika ingin menambah pemahaman terhadap Islam sesuai ajaran Rasul.

C. Respon Kaum Salafi Terhadap Demokrasi di Kabupaten Blitar

Salafi sebagai bagian rakyat yang berbangsa dan bernegara dengan menerapkan demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan negara. Salafi mengambil peranan sebagai rakyat yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara.

---

[16] Abu Hakim, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 20.00.

[17] Abu Muhammad Ubaidillah, Ustadz Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 15 Desember 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salafi ikut serta merealisasikan kemaslahatan umum dan menghindarkan dari segala macam kerugian dan keburukan. Salafi sebagai muslim yang meyakini syari'at Islam yang bersumber dalam Al Qur'an dan Sunnah yang merupakan syari'at, aturan, petunjuk tuntunan hukum yang sempurna untuk menyampaikan seluruh umat manusia kepada semua bentuk kebaikan dan menjauhkan dari berbagai bentuk keburukan lahir dan batin dunia dan akhirat.[18]

Seluruh aktifitas kehidupan termasuk aktifitas berbangsa dan bernegara, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahananan keamanan harus mengikuti syari'at Allah SWT, dzat yang menetapkan syari'at di atas seluruh *asmaul khusnanya yakni Al Hakim, Arrahman, Arrahim dst,* tidak akan mungkin ditandingi atau bahkan dikalahkan oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang kapasitasnya terbatas dari seluruh sisi.[19]

Salafi mengambil peranan dalam demokrasi untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam seluruh aspeknya. Caranya dengan menyampaikan pengajaran, pemahaman dan nasehat kepada rakyat maupun penguasa, sehingga mereka menyadari kesempurnaan syari'at Allah di dalam diri manusia tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan.[20]

---

[18] Abu Muhammad Ubaidillah, Ustadz Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 15 Januari 2011 jam 09.00.

[19] *Ibid.*

[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman dan keyakinan akan kebenaran dan kesempurnaan syari'at, maka rakyat dan penguasa akan mengenalkan tuntunan *syar'i* dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salafi mengambil peranannya ---sebagai rakyat--- di tengah sistem demokrasi dengan menentukan arah dan kebijakan pemerintah seperti yang ditentukan oleh syari'at. Mempelajari dan memahami syari'at bagi dirinya sendiri dan mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya, tanpa memaksa kehendak. Dengan demikian, rakyat memiliki batas dan tanggung jawab, tanpa harus memaksakan konfrontasi dan penentangan kepada penguasa ataupun berbagai sikap yang menimbulkan berbagai kekacauan dan kerusakan yang justru kontradiktif dengan tujuan kemaslahatan.[21]

Irwan (jama'ah Salafi di Kabupaten Blitar) memberikan respon tentang demokrasi yang diadopsi dari pemikiran Barat dengan berkata:

> Terlepas dari dikotomi Islam dan Barat, demokrasi adalah sistem yang lebih banyak mendatangkan kerusakan yang seharusnya tidak diterima dalam peradaban manapun. Atas nama hak sebagai warga negara membebaskan keikutsertaan setiap orang untuk ikut serta dalam menentukan segala urusan negara tanpa adanya syarat kapabilitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmiah yang berlaku secara universal. Keikutsertaan rakyat yang kebanyakan tidak faham permasalahan, ditunggangi kelompok-kelompok bermodal yang akhirnya menyeret ke dalam kehidupan feodalisme yang atas dasar sistem itulah demokrasi di Barat dibangun.[22]

Sedangkan, Abu Fira (jama'ah Salafi di Kabupaten Blitar) memberikan respon demokrasi yang diadopsi Indonesia dari Barat yang mengatakan:

---

[21] *Ibid.*

[22] Irwan, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 08.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Demokrasi yang selama ini dipahami apakah itu berasal dari pemikiran Barat maupun selain dari Barat adalah suatu sistem yang cepat atau lambat akan menyeret suatu bangsa yang menganutnya ke dalam kehancuran.[23]

Terkait tingkat kesesuaian atau tidak Indonesia menganut sistem demokrasi, Irwan berpendapat sebagai berikut:

> Di antara keburukan sistem demokrasi di atas, penerapannya di Indonesia diperparah oleh kondisi masyarakat yang tidak cukup berbudaya sehingga semakin menimbulkan kekacauan, dekondensi moral yang akan berujung kepada krisis kehidupan berbangsa dan bernegara.[24]

Sedangkan, Abu Fira sedikit memiliki penekanan yang berbeda tentang hal di atas. Abu Fira mengatakan sebagai berikut:

> Sistem demokrasi "Tidak Sesuai" dianut oleh setiap negara termasuk Indonesia. Alasannya, demokrasi membuka pintu keikutsertaan setiap warga negara untuk ikut serta di dalam menentukan kebijakan pemerintah. Padahal kebanyakan rakyat tidak memahami permasalahan yang akhirnya justru dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu untuk melegitimasikan pemerintah dan menciptakan instabilitasi pemerintahan sebagai suatu bentuk persaingan perebutan kekuasaan di antara kelompok-kelompok kekuatan politik yang ada tanpa memperhatikan etika dan moral.[25]

Abu Fira berpendapat tentang perjalanan demokrasi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan sebagai berikut:

> Sistem multi partai yang ada menjadikan tidak adanya *singgle mayority* di parlemen, sehingga pemerintah menjadi lemah. Akibatnya pemerintah tidak fokus di dalam merealisasikan program-program pembangunan, tetapi disibukkan oleh pertarungan politik dalam rangka perebutan kekuasaan.[26]

---

[23] Abu Fira, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 20.00.
[24] Irwan, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 08.00.
[25] Abu Fira, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 20.00.
[26] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pernyataan kaum Salafi di atas, dapat diidentifikasikan bahwa kaum Salafi sebagai komunitas Islamis melioris karena bersikap ambigu dalam menyikapi hubungan Islam dan demokrasi, antara menerima dan menolak. Kaum Salafi tidak membenarkan bahwa kaum menolak demokrasi, tetapi kaum Salafi menyatakan berpartisipasi aktif dalam demokrasi untuk menciptakan kemaslahatan bangsa dan negara. Kaum Salafi dikatakan menerima demokrasi, tetapi kaum Salafi menyatakan demokrasi adalah sebuah sistem yang "tidak sesuai" dianut oleh setiap negara termasuk Indonesia, karena cepat atau lambat akan mengalami kehancuran. Kehancuran disebabkan dari kondisi masyarakat yang "belum siap" dengan siklus demokrasi dan oknum elit yang mengejar kepentingan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Makna Politik bagi Kaum Salafi di Kabupaten Blitar

1. Makna Politik

Politik (*siyasah*) diartikan mengelola kepentingan umum dalam lingkup negara dengan cara-cara yang dapat menjamin terealisasinya kemaslahatan umum dan menghindarkan segala macam kerugian dengan jalan tidak melanggar syari'at Islam dan kaidah-kaidah asasinya, sekalipun tidak sependapat dengan tokoh mujtahid.[1]

Sedangkan, makna politik bagi Irwan, "Strategi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat dunia dan akhirat dengan menggunakan segala sumber daya yang ada yang dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* (bijaksana)".[2] Menurut Irwan, cara kaum Salafi berpolitik dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta berperan aktif untuk tujuan bersama berdasarkan ketentuan syari'at yakni:

> Menjaga hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam upaya mencapai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ikut serta secara aktif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan dan peranan yang dimiliki dalam koridor-koridor yang dibenarkan oleh syari'at.[3]

---

[1] Syaikh Abdul Malik Al Jazair, *Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen: Fatwa Syaikh Nashiruddin Al Albani* (Yogyakarta: Media Hidayah, 1999), 12.

[2] Irwan, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 08.00.

[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, politik (*siyasah*) adalah hukum-hukum pemerintahan, pengadilan, seluk beluk kementerian, lembaga-lembaga pemerintahan, pengaturan militer dsb. Politik (*siyasah*), secara *syar'i* atau akal tidak diragukan lagi hukumnya wajib, karena problema kehidupan manusia tidak akan berjalan tanpa adanya imam, baik adil maupun dzalim. Dalam suatu kata hikmah disebutkan, "Sulthan yang dzalim lebih baik daripada kekacauan yang terus-menerus".[4]

Ibnu Taimiyah berkata, "Orang harus mengetahui bahwa mengatur persoalan kehidupan manusia merupakan kewajiban agama tertinggi, bahkan agama dan dunia tidak akan menjadi baik tanpa hal ini".[5] Dengan demikian, manusia tidak bisa mengurus kepentingannya dengan baik bila tidak bersatu di bawah seorang pemimpin. Kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* tidak akan terlaksana tanpa adanya kekuatan dan kepemimpinan.

Menurut 'Abdul Wahab Khalaf, mengangkat pemimpin pemerintah merupakan kewajiban agama dan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah dimaksudkan menaati Allah dan Rasul dalam memilih pemimpin. Kepemimpinan menjadi rusak bila mayoritas manusia mengejar kedudukan atau harta benda dengan jabatan kepemimpinannya.[6]

Pernyataan 'Abdul Wahab Khalaf di atas, sedikit berbeda dengan mujtahid sebelumnya tentang kebijakan politik. Jadi, para *ulil amri* yang

---

[4] Syaikh Abdul Malik Al Jazair, *Haramkah,* 12.

[5] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam, terj. Rafi Munawir* (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 10.

[6] *Ibid.*, 176-178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kemampuan berijtihad dapat melakukan kebijakan politik (*siyasah syar'iah*) tanpa terikat oleh pendapat para ulama' terdahulu. 'Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa kebijakan politik adalah suatu usaha mewujudkan kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum tidak ditetapkan secara khusus oleh agama, tetapi hanya pedoman umum.[7]

Seiring dengan perjalanan waktu, banyak kasus yang tidak diketahui oleh generasi sebelumnya. Selanjutnya, para penguasa meminta fatwa kepada ahli-ahli fiqih yang telah menutup pintu ijtihad serta mengharamkan dirinya mengeluarkan pendapat baru yang tidak terdapat dalam madzab sehingga mengakibatkan para penguasa terpaksa melakukan ijtihad sendiri, baik dengan cara yang hak maupun yang bathil. Penguasa semakin menjauhkan diri dari ulama'-ulama' *syar'i* dengan beranggapan bahwa syari'at tidak langkap untuk memberikan jawaban sehingga menimbulkan fitnah.[8]

Akhirnya, tindakan penguasa berlanjut dengan penolakan-penolakan ayat-ayat Al Qur'an. Penguasa berpijak pada pemikirannya sendiri disebabkan kebodohan atau kelalimannya. Masyarakat awam pun berani mengabaikan syari'at, bahkan banyak ayat-ayat Al Qur'an yang diputar-balikkan. Hal yang pahit dan menyedihkan sekarang adalah banyak muncul segolongan orang yang

---

[7] Syaikh Abdul Malik Al Jazair, *Haramkah,* 16.
[8] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bodoh tentang agama. Artinya mereka tidak mengerti jalan yang digariskan oleh para Nabi dan orang-orang mukmin.[9]

Akhirnya, mereka beralih ke sistem Barat yang kafir agar bisa mendirikan suatu pemerintah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Misalnya, bermain-main dengan demokrasi dan parlemen serta membangun *pressure group* guna menekan pemerintah. Terkadang penguasa mengaku bahwa langkah semacam itu dilakukan demi kemaslahatan umum dan agama. Penguasa mengaku terpaksa melakukannya walaupun bertentangan dengan nuraninya. Penguasa beranggapan bahwa dusta dan mencaci maki bahkan melakukan pengkhianatan dan tipu daya terhadap partai-partai lain merupakan hal yang dibenarkan.[10]

Masyarakat awam sudah mengerti bahwa tidak ada politikus yang tidak berdusta dan tidak membuat pernyataan-pernyataan yang bermuka dua. Perilaku para politikus jauh lebih jelek daripada perilaku yang dihujatnya. Para politikus yang berlabel muslim dipandang oleh kaum Salafi sebagai tokoh anutan bagi masyarakat awam.

Pengertian politik yang keliru di atas, telah diperingatkan oleh Ibnul Qayyim, "Masalah ini telah menjerumuskan orang dan menyesatkan pengertian mereka, sehingga menjadi masalah yang kabur dan sulit". Sebagian orang ada

---

[9] *Ibid.*, 17.
[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlebihan sehingga mereka melanggar batas dan mengabaikan hak-hak orang lain.[11]

Para politikus dinilai kaum Salafi sebagai durjana yang berani melakukan kerusakan. Para politikus tersebut, menjadikan syari'at "mandul" tanpa bisa mewujudkan kebajikan bagi manusia. Para politikus menjadikan diri sendiri sebagai hakim untuk membedakan yang hak dan yang bathil. Para penguasa dan politikus mempermainkan hukum-hukum Allah dengan sadar, sementara orang tahu bahwa dalil-dalil itu berlawanan dengan kaidah syari'at. Sikap semacam ini, dikatakan kaum Salafi sebagai kebodohan terhadap syari'at dan diterapkan dalam kehidupan nyata.[12]

Ketika sekarang penguasa melihat masyarakat tidak peduli dengan seruan kembali pada syari'at, maka para penguasa memanfaatkan peluang tersebut dengan membuat undang-undang politik untuk melegitimasi kepentingannya. Akibat penguasa yang melawan syari'at dalam setiap kebijakan menimbulkan bencana panjang, kerusakan di tengah masyarakat serta kekalutan yang sulit dikendalikan. Selanjutnya, muncullah ulama' dengan tameng agama yang mendukung dan membenarkan pembuatan undang-undang politik yang berlawanan dengan hukum Allah dan Rasul.

---

[11] *Ibid.*, 18.
[12] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Reformasi Politik

Kaum Salafi mengatakan bahwa politik yang adil bertentangan dengan syari'at Islam yang sempurna, tetapi justru merupakan bagian yang tak terpisahkan. Secara terminologi, hal itu diberi nama *siyasah,* sedangkan *siyasah* yang adil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari syari'at itu sendiri.[13] Selanjutnya, muncul problema tentang reformasi politik. Apakah reformasi politik berjalan dengan baik jika yang direformasi pemerintah atau masyarakat?, jika dilakukan melalui jalur politik, siapa yang dianggap paling berkompeten masih diperdebatkan.

Pertanyaan di atas, terdapat dalam firman Allah sehingga menurut kaum Salafi tidak ada tempat bagi ijtihad. Allah berfirman: *"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka sendiri merubah diri mereka"* (Al Anfal : 53). Bagi kaum Salafi, ayat tersebut tidak memerlukan penafsiran lagi, tetapi kebanyakan orang menamakan dirinya sebagai kelompok gerakan Islam yang tetap melakukan ijtihad dengan *alibi*, "Allah tiada merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah pemerintahan mereka".[14]

Realitasnya, para penguasa menutup mata dengan mengabaikan dan melupakan agama sebagai hakim penguasa untuk mencapai kejayaan. Allah telah menegaskan bahwa tiada yang dapat berkuasa, memerintah dan meraih

---

[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemenangan di bumi kecuali dengan bantuan umat (rakyat). Umat tersebut adalah umat ahli ibadah yang bertauhid bersih.

Dalam buku *Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen: Fatwa Syaikh Nashiruddin Al Albani,* Syaikh Al Albani menyatakan bahwa:[15]

Pertama, tidak perlu menegaskan bahwa politik itu bagian dari agama, bukan dalam artian memisahkan agama dari negara. Allah telah menegaskan bahwa kerusakan syari'at adalah akibat mengikuti hawa nafsu. Allah juga menegaskan bahwa tidak akan timbul tindakan pengrusakan syari'at, kecuali karena kebodohan.

Kedua, kegagalan Islam dewasa ini —dalam mereformasi masyarakat yang kerusakannya sudah akut— disebabkan kesalahan langkah reformasi politik itu sendiri. Orang menjadikan gerakan politik sebagai basis gerakan reformasinya dan mengaku bahwa setiap gerakan tersebut metodenya baik, dakwahnya utuh dan disiplinnya kukuh. Syaikh Al Albani menyoroti fatwa yang menyatakan bahwa politik (lembaga-lembaga politik) adalah suatu jalan yang terpaksa diambil karena tidak adanya pilihan lain.

Langkah politik dewasa ini dinilai oleh Syaikh Al Albani sebagai usaha yang disusupi setan untuk menghancurkan hasil usaha yang baik. Muslim diminta kritis melihat kelompok yang bermaksud merubah masyarakat melalui lembaga politik akan ikut merusak tatanan sosial. Muslim juga perlu memberikan nasehat kepada penguasa dengan cara-cara yang benar dan

[15] *Ibid.*, 24-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu dalam kebaikan, seperti yang dilakukan Nabi Yusuf sebelum diangkat menjadi pembantu raja.

Begitu pula hal yang dicontohkan oleh orang Salaf yang ikhlas dalam memberikan nasehat. Syaikh Al Albani mengingatkan adanya "politik pasang jembatan emas"[16] yang dilakukan oleh gerakan Islam dewasa ini. Kenyataan saat ini, kerusakan agama pada masyarakat dan munculnya banyak fitnah terhadap agama. Pemahaman terhadap agama bersifat universal untuk ditafsirkan oleh seluruh kalangan orang Islam.

3. Orang yang Berhak Berpolitik

Mengenai siapa yang berhak menjadi politikus yang berhak memberi fatwa adalah seorang mujtahid, maka yang berhak berpolitik adalah dia (mujtahid). Imam Syatibi berkata, "Bila seseorang telah mencapai tingkat kemampuan memahami syari'at, dia akan mampu memahami segala permasalahan, setiap dari syari'at ini. Orang semacam ini dapat mencapai tingkat sebagai pangganti Nabi dalam mengajarkan syari'at, memberi fatwa dan menetapkan hukum sesuai dengan pengetahuan yang Allah berikan kepadanya".[17]

---

[16] Perjuangan parlemen sebagai jalan untuk mendirikan negara Islam ibarat "memasang jembatan emas" artinya mengiming-iming masa depan yang lebih baik, tetapi ternyata ujung-ujungnya hanya malapetaka.

[17] Syaikh Abdul Malik Al Jazair, *Haramkah,* 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'i juga berkata, "Tidaklah dapat diajak bermusyawarah dalam menghadapi problema, kecuali seorang yang amanat lagi memahami Al Qur'an dan Sunnah, riwayat-riwayat sahabat, pendapat para ahli, *qiyas* dan bahasa Arab". Ibnu Shabagh dalam kitab *Asy Syamil* mengatakan, "Hendaklah seorang imam harus mencapai tingkat ijtihad, karena jika tidak maka tidak akan dapat memberikan pendapat mengenai suatu masalah".[18]

Imam Syatibi berkata lagi bahwa, "Para ulama' telah sepakat bahwa *imamatul qubra* (pemimpin eksekutif) tidak bolah dipegang kecuali oleh orang yang memiliki kemampuan berijtihad dan dapat memberi fatwa dalam ilmu-ilmu *syar'i*". Syaikh Al Albani berkomentar, "Kesepakatan ini tidaklah menjadi gugur karena adanya orang-orang yang menentang syarat-syarat kemampuan berijtihad bagi seseorang imam. Seseorang dapat menjabat sebagai *imamatul qubra* selama memiliki pendamping ahli ijtihad untuk tempat bertanya, seperti yang dikatakan oleh Syahrastani". [19]

Berdasarkan fatwa para ulama' di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat seseorang dapat menjadi imam adalah adanya kemampuan berijtihad pada dirinya atau pada orang lain dari kalangan ahli fiqh yang mendampingi sebagai rujukannya. Seseorang disebut mujtahid, apabila memenuhi rincian sebagai berikut:[20]

---

[18] *Ibid.*, 34.
[19] *Ibid.*
[20] *Ibid*, 33-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, apabila seseorang berkemampuan menggali hukum-hukum syari'at dari dalil-dalil dan memahami obyek permasalahan yang dihadapi. *Kedua,* seseorang yang amanat dan memahami Al Qur'an dan Sunnah, riwayat sahabat, qiyas dan bahasa Arab. *Ketiga,* tingkat kemampuan seseorang dalam berijtihad untuk mengatasi permasalahan.

Sedangkan, Kaum Salafi di Indonesia menempatkan tekanan dakwah yang kuat pada pendidikan. Bukan hanya proses pendidikan akademis tetapi proses menyeluruh artinya menumbuhkan pribadi muslim yang faham agama dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian dakwah kaum Salafi terfokus pada Islamisasi masyarakat dan tidak menyentuh wilayah politik (non-politis). Dalam menjalankan dakwahnya kaum Salafi tidak boleh membentuk organisasi massa, karena bertentangan dengan prinsip *non-hizbiyyah.*[21]

Perjuangan politik tampaknya memang bukan agenda utama kaum Salafi, karena perhatian dan keprihatinan kaum Salafi berkaitan dengan masalah aqidah. Menurut kaum Salafi, masalah aqidah umat Islam dianggap banyak yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. *Bid'ah* dan *khurafat* menyebabkan kemurnian Islam tercemar dan berkembang dalam masyarakat. Tuntutan kaum Salafi tentang agama adalah untuk mengembalikan masyarakat ke dalam Islam yang benar atau murni, seperti yang dipraktekkan Nabi dan para

[21] M. Imdadun Rahmat, *Arus,* 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat.[22] Kaum Salafi mengkritik gerakan Wahabiyah sebagai orang Islam yang tidak mempraktekkan Islam secara benar artinya tidak lagi ber-*manhaj* Salafi.

Kritik kaum Salafi terhadap para fundamentalis cukup keras. Penekanan kritik kaum Salafi berkaitan dengan tidak pentingnya media politik sebagai metode untuk berdakwah. Hal tersebut adalah cara ambisius yang menggelincirkan kaum fundamentalis. Beberapa tokoh fundamentalis dianggap telah meninggalkan habitatnya sebagai pendakwah. Keterlibatan kaum Salafi di bidang lain akan menyibukkan kaum Salafi sehingga meninggalkan tujuan utama berdakwah. Masalah politik adalah masalah yang cukup penting, tetapi harus dikaji lebih mendalam dasar-dasar *syar'i*-nya karena tanpa dasar itu upaya yang dilakukan akan sia-sia maka harus dipelajari dulu meskipun secara tekstual.[23]

Kaum Salafi tampaknya lebih memfokuskan diri pada pembentukan masyarakat secara tauhid Islam benar dari sana segala aspek kehidupan akan dengan sendiri mengikutinya. "Kalau tauhidnya sudah benar, syari'at Islam akan dengan sendirinya dilaksanakan karena masyarakat yang tauhidnya kuat akan cenderung mematuhi perintah agama", kilah kaum Salafi.[24] Maka, kaum Salafi mengajarkan ketaatan total kepada *manhaj* berdasar Nabi Muhammad dan *salafus shalih. Al Salaf* merupakan kata umum yang merujuk pada pelopor

---

[22]Afadlal dkk, *Islam*, 174.
[23] *Ibid.*, 175.
[24] *Ibid.*, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang shaleh dan semua orang yang mengikuti jalan *salafus shalih* dalam keyakinan, moral dan tingkah laku.

4. Tipologi Politik Kaum Salafi

Tipologi kepribadian politik dipengaruhi oleh kepribadian kepemimpinan otoriter, Machiavelist dan demokrat. Model tersebut, ada empat faktor yang mempengaruhi perilaku politik kaum Salafi yakni sebagai berikut:

Pertama, lingkungan politik tak langsung, seperti sistem politik di Indonesia membuat kaum Salafi ikut berpartisipasi aktif dalam demokrasi selama tidak bertabrakan dengan syari'at. *Kedua,* lingkungan politik langsung mempengaruhi kepribadian kaum Salafi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pemahaman Islam berdasar metode Salaf diaplikasikan dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya, menurut kaum Salafi, memuliakan pemerintah dengan cara mentaatinya adalah kewajiban berdasar syari'at. Jika timbul keburukan atau kesalahan pada pemerintah, maka kaum Salafi menasehatinya secara tertutup tidak mengumbarnya pada media massa.

Ketiga, keperibadian tercermin dalam sikap individu. Kebiasaan sebagai kepribadian kaum Salafi yang memiliki kedekatan dengan agama yakni belajar agama, berdakwah, membaca Al Qur'an tercermin dalam pemikiran dan perilaku politik kaum Salafi. Kaum Salafi pemikiran politiknya bersumber dari ayat-ayat dan hadits-hadits, sedangkan perilaku politiknya mencontoh *salafus shalih* dan fatwa-fatwa para ulama' yang diyakininya. *Keempat,* situasi menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indikator menentukan sikap politiknya. Dalam pemilu, kaum Salafi tidak serta merta menggunakan hak pilihnya. Kaum Salafi berpartisipasi dalam pemilu untuk mendukung stabilitas negara, maka dituntut untuk melihat perkembangan proses pemilu. Jika menimbulkan kemaslahatan, maka kaum Salafi menggunakan hak pilihnya (mencoblos).

Berdasarkan faktor di atas, perilaku kaum Salafi yang memulai pemahaman berdasar pada Al Qur'an dan Sunnah secara konsisten tercermin dalam pengamalan kehidupan kaum Salafi termasuk politik. *Manhaj salaf* diaplikasikan dalam pemikiran dan perilaku politik. Dalam menentukan sikap politik kaum Salafi mencari sumber dari Al Qur'an dan Sunnah serta mengikuti fatwa para ulama'.

Sedangkan, teori Pareto menyatakan bahwa masyarakat akan mempertahankan elit kecil dan kepentingannya, tetapi bukanlah revolusioner. Realitasnya, kaum Salafi dari waktu ke waktu mampu menyebarkan ajaran Islam dan diikuti oleh masyarakat mencapai hampir seluruh kecamatan di Kabupeten Blitar. Ukuran revolusioner membutuhkan waktu untuk berproses, artinya cepat lambat kaum Salafi diyakini akan membuat gebrakan revolusioner terbukti munculnya gerakan Salafi dihampir seluruh kota-kota di Indonesia.

Sedangkan bagi Mosca melukiskan masyarakat terdapat distribusi kekuasaan yakni yang memerintah dan yang diperintah. Kemudian, Ramlan Surbakti berasumsi bahwa realitasnya masyarakat tidak mendapat distribusi kekuasaan secara merata sehingga muncul elit politik untuk saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankannya. Kaum Salafi dapat disimpulkan sebagai elit politik yang berorientasi pada kepentingan pribadi dan golongan. Kaum Salafi bersifat tertutup pada orang yang bukan komunitasnya, tetapi mencoba menyebarkan Islam pada seluruh elemen masyarakat. Elit ini disebut elit konservatif.

Berikutnya, potret gerakan Islam sebagai respon ideologi Barat dengan harapan untuk merehabilitasi sejarah Islam sesuai masa Nabi dan Rasul. Kaum Salafi menginginkan menerapkan Islam dalam kehidupan masyarakat. Kaum Salafi berusaha melakukan purifikasi terhadap Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaum Salafi dikategorikan sebagai gerakan radikal Islam.

Hal diatas sesuai dengan garapan dakwah Salafi yang ingin mempertahankan Islam secara murni dan sesuai dengan Islam dalam Al Qur'an dan Sunnah serta praktek *salafus shalih.* Salafi bukan gerakan organisasi massa yang berorientasi pada politik, karena lebih mengutamakan pelembagaan Islam dalam masyarakat secara murni. Kaum Salafi menyatakan bahwa kaum Salafi berpartisipasi aktif dalam demokrasi Indonesia. Kaum Salafi mendukung pemerintahan Indonesia, selama tidak menyalahi syari'at yang tertulis dalam Al Qur'an dan Sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perilaku Politik Kaum Salafi dalam Merespon Demokrasi di Kabupaten Blitar

1. Perilaku Politik Kaum Salafi Terhadap Pemilu (Pemilihan Umum)

Pemuda FIS[25] datang pada Syaikh Nashiruddin Al Albani untuk berdialog seputar partai dan parlemen. Syaikh Nashiruddin Al Albani berpendapat bahwa kaum muslimin terlarang masuk dalam parlemen yakni:[26]

Pertama, hal itu menyalahi petunjuk Nabi, karena Nabi tidak pernah duduk bersama orang-orang kafir dalam suatu majelis yang disebut parlemen untuk membuat undang-undang. *Kedua,* setiap orang yang masuk parlemen sudah pasti melakukan penyimpangan dari ajaran Islam sedikit demi sedikit.

Syaikh Nashiruddin Al Albani menjawab pertanyaan tentang hukum *syar'i* tentang pemilu parlemen sebagai jembatan mendirikan negara Islam dan Khilafah Islami. Menurut Syaikh Nashiruddin Al Albani, tidak diragukan lagi setiap orang Islam harus berjuang untuk menegakkan negara Islam yang didasarkan pada hukum Allah dan Rasul menurut *manhaj salafus shalih.* Hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu yang bermanfaat dan amal shalih.[27]

Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum *syar'i* tentang membantu dan mendukung kegiatan pemilu untuk parlemen. Syaikh Nashiruddin Al Albani menjawab bahwa tidak terdapat nasehat kepada siapa pun untuk mencalonkan

---

[25] FIS (Islamic Salvation Front) adalah partai Islam di Aljazair yang memenangkan pemilu beberapa tahun yang lalu.

[26] Syaikh Abdul Malik Al Jazair, *Haramkah,* 55.

[27] *Ibid,* 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri menjadi anggota parlemen di negara yang tidak menjalankan hukum Allah, walaupun undang-undang dasarnya menyebut Islam sebagai agama negara. Namun, jika umat Islam melihat bahwa para calon-calon anggota parlemen adalah musuh-musuh Islam, sedangkan terdapat calon-calon beragama Islam dari partai-partai Islam, maka disarankan untuk memilih calon-calon dari partai Islam dan orang-orang yang mendekati *manhaj*.[28]

Lutfie Mahendra, selaku Jama'ah Salafi di Kabupaten Blitar, ketika dimintai tanggapan mengenai pandangan kaum Salafi terhadap pemilu di Indonesia, mengatakan sebagai berikut:

> Dalam memilih pemimpin hendaknya dilakukan oleh orang yang mempunyai kapabilitas untuk memilih calon pemimpin dan bukannya memilih pemimpin dilakukan oleh semua rakyat dimana dari sekian banyak rakyat Indonesia tidak semuanya punya kapabilitas untuk memilih pemimpin secara tepat dikarenakan latar belakang ilmu dan pendidikan yang berbeda.[29]

Debbi Arifuddin juga berkomentar serupa yakni:

> Pemilihan seorang pemimpin seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapabilitas dalam melakukan pemilihan. Sehingga mereka mampu melihat kualitas dari para calon pemimpin. Dan bukannya pemilihan diserahkan kepada rakyat yang keadaannya tidaklah memiliki kapabilitas untuk memilih. Rakyat memiliki hak menjadi rakyat namun tidak memiliki hak untuk memilih.[30]

Bagi kaum Salafi, dalam sistem demokrasi pemilihan pemimpin dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat sehingga pemimpin merupakan wakil suara mayoritas. Hal ini, menurut kaum Salafi bertentangan

---

[28] *Ibid.*, 71-72.
[29] Lutfie Mahendra, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 22.00.
[30] Debbi Ariffudin, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 21.15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kekuasaan adalah milik Allah dan pemerintahan harus berdasarkan keyakinan tersebut. Muslim dilarang untuk menyerahkan kekuasaannya kepada kaum mayoritas kerena suara mayoritas tidak menjamin tidak berbuat kesalahan dan kesesatan serta belum tentu berjuang untuk kejayaan Islam.

Berbeda dengan Noorhaidi Hasan yang menulis bahwa penolakan kaum Salafi terhadap demokrasi mengakibatkan kaum Salafi menolak cara bernegara yang lahir dari sistem demokrasi. Kaum Salafi menolak pemilu sebagai cara untuk memilih pemimpin. Pemilu bertujuan mengetahui kehendak mayoritas masyarakat bukan kehendak Tuhan, sebagai dasar untuk memilih pemimpin dan ini adalah amalan jahiliyah. Pemilu adalah cara musuh Islam untuk menguasai umat Islam karena menyerahkan kekuasaan yang rakyat miliki kepada musuh Islam.[31]

Hal lain yang menjadi ide utama kaum Salafi adalah bahwa Salafi bukanlah gerakan politik dalam arti yang bersifat praktis. Bahkan mereka memandang keterlibatan dalam semua proses politik praktis seperti pemilihan umum sebagai sebuah *bid'ah* dan penyimpangan. Ide ini terutama dipegangi dan disebarkan dengan gencar oleh pendukung Salafi Yamani. Muhammad As-

[31] Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad Jihad : Islam, Militancy and The Quest for Identity in Post New Order Indonesia* (Utrecht : Faculteit der Letteren en International Institute for The Study of Islam in the Modern Word, 2005), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sewed ketika masih menjabat sebagai ketua FKAWJ mengulas kerusakan-kerusakan pemilu sebagai berikut: [32]

Pertama, pemilu adalah sebuah upaya menyekutukan Allah (syirik) karena menetapkan aturan berdasarkan suara terbanyak (rakyat), padahal yang berhak untuk itu hanya Allah.

Kedua, apa yang disepakati suara terbanyak itulah yang dianggap sah, meskipun bertentangan dengan agama atau aturan Allah dan Rasul-Nya.

Ketiga, Pemilu adalah tuduhan tidak langsung kepada islam bahwa ia tidak mampu menciptakan masyarakat yang adil sehingga membutuhkan sistem lain.

Keempat, partai-partai Islam tidak punya pilihan selain mengikuti aturan yang ada, meskipun aturan itu bertentangan dengan Islam.

Kelima, dalam pemilu terdapat prinsip *jahannamiyah*, yaitu menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan-tujuan politis, dan sangat sedikit yang selamat.

Terakhir, pemilu berpotensi besar menanamkan fanatisme jahiliyah terhadap partai-partai yang ada.

Kerusakan-kerusakan pemilu di atas, tidak secara mutlak dapat direpresentasikan bahwa kaum Salafi golput. Terbukti dengan jawaban kaum Salafi atas pertanyaan tentang bentuk partisipasinya dalam pemilu di Indonesia. Debbi Ariffudin dan Lutfie Mahendra mengakui dengan mengatakan:

---

[32] Muhammad Umar As-Sewed. www.salafy.or.id/print.php?id_artikel=557.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kaum Salafi berpartisipasi dalam pemilu karena untuk mendukung stabilitas negara maka dituntut untuk melihat perkembangan proses pemilu di Indonesia. Masalah kaum Salafi masuk TPS (Tempat Pemungutan Suara), apabila menimbulkan kemaslahatan dalam proses pemilu maka ikut serta mencoblos, jika tidak sebaliknya.[33]

Berbeda dengan Salafi Haraki yang cenderung menganggap masalah ini sebagai persoalan *ijtihadiyah* belaka. Dalam sebuah tulisan bertajuk al-Musyarakah fi al-Intikhabat al-Barlamaniyah yang dimuat oleh situs islamtoday.com (salah satu situs yang dianggap sering menjadi rujukan mereka dikelola oleh DR. Salman ibn Fahd al-'Audah). Dia memaparkan bahwa sistem peralihan dan penyematan kekuasaan dalam Islam tidak memiliki sistem yang baku, sehingga tidak menutup mungkin untuk mengadopsi sistem pemilu yang ada di Barat dan "memodifikasi"nya sesuai dengan prinsip-prinsip politik Islam. Alasan utamanya adalah tidak lebih dari sebuah bagian adminstratif belaka yang memungkinkan untuk mengadopsinya selama mendatangkan maslahat.[34]

Salah satu jalan untuk memecahkan persoalan umat Islam adalah kembali kepada ajaran Islam yang terkandung dalam Al Qur'an dan Sunnah, Islam telah memberikan cara untuk memilih pemimpin. Menurut kaum Salafi, Islam mengajarkan pemimpin dipilih oleh sebuah lembaga yang beranggotakan para cerdik dalam bidang politik dan agama yang bekerja atas bimbingan Allah

---

[33] Debbi Ariffudin dan Lutfie Mahendra, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 21.15 dan 20.00

[34] Ja'far Umar Thalib, *Saya Merindukan Ukhuwah Imaniyah Islamiyah*. Majalah Salafy, Edisi 5, 1426/2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Rasul-Nya. Kelompok cerdik ini disebut *ahl al hall wa al 'aqd* yang memilih pemimpin untuk dipatuhi oleh masyarakat.[35]

Hal di atas, telah dikonsepsikan oleh Imam Al Mawardi tentang bentuk pemerintahan dalam Islam.[36] Dalam kitab *Al Ahkam Al Sultaniyah,* Al Mawardi membahas tentang peran yang bisa dimainkan oleh negara dalam memenuhi keperluan manusia di bidang duniawi termasuk agama. Menurut Al Mawardi dalam memilih seorang pemimipin (*khalifah*) awalnya perlu dibentuk dewan pemilih (orang yang berilmu dan memahami agama Islam). Dewan *imam (khalifah)* bertugas mengangkat salah satu dari mereka sebagai *imam.* Jabatan *imamah* (kepemimpinan) dianggap sah dengan dua cara yakni *pertama :* pemilihan oleh *ahlu al-aqdi wa al-hal* (parlemen). *Kedua :* penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya.

2. Perilaku Politik Kaum Salafi Terhadap Peran Partai Politik

Kata *hizbiyyah* berasal dari kata *hizb* yang berarti kelompok atau partai. Kaum Salafi menggunakan istilah tersebut untuk menyebut gerakan-gerakan dakwah Islam yang menggunakan politik sebagai salah satu tujuan dalam berdakwah dan dakwah atas nama kelompok, bukan dakwah untuk purifikasi Islam. Kata *hizbiyyah* digunakan para aktivis Salafi untuk mengkritik gerakan-

---

[35] Ahmad Bunyan Wahib, *Gerakan Dakwah Salafiyah: Konflik Ideologis dan Sosial di Lombok Barat* (2006), 25.

[36] Imam Al Mawardi terj Fadli Bahri, *Al Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Jakarta : Darul Falah, 2006), 2-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan yang menggunakan media politik sebagai alat gerakan atau dakwah. Menurut kaum Salafi, cara tersebut adalah cara baru yang tidak ada dasar hukumnya.[37]

Hal tersebut menyebabkan tujuan utama berdakwah kemudian terabaikan karena cara tersebut memfokuskan kepentingan politik kelompok sendiri. Luqman Baabduh menyebut beberapa contoh gerakan dakwah *hizbiyyah* seperti Ikhwanul Muslimin (IM) didirikan oleh Hasal Al Banna, Hizbut Tahrir (HT) didirikan oleh Taqiyuddin Al Nabhani dan Al Qaeda dipimpin oleh Usamah bin Laden.[38]

Ibnu Muslim, selaku Jama'ah Salafi di Kabupaten Blitar, ketika dimintai pandangan mengenai peran partai politik dalam pemerintahan Indonesia, mengatakan sebagai berikut:

> Adanya partai politik mengkotak-kotakkan masyarakat ke dalam partai-partai yang berbeda-beda tujuan walaupun pada dasarnya mengaku untuk mensejahterakan Indonesia. Akibatnya akan membuat perpecahan, pada dasarnya partai politik itu berfungsi sebagai alat politik yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi publik kepada final pemangku kekuasaan. Tetapi, pada kenyataannya sekarang parpol cenderung bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan kelompok tertentu terkait jabatan atau kedudukan bahkan kekuasaan dan harta, Partai politik hanya butuh "suara" masyarakat untuk mendapatkan kedudukan di parlemen. Pada kenyataannya, setelah kader-kader parpol

---

[37]Abdul Mu'thi mendefinisikan *dakwah hizbiyyah* dengan dakwah politik fanatik terhadap kelompok tertentu yang sama sekali tidak menggunakan *manhaj* Salafi. Oleh karena itu, *dakwah hizbiyyah* bertentangan dengan dakwah Salafi dengan beberapa alasan yakni *dakwah hizbiyyah* tidak sesuai dan menyimpang dari *sabil al mu'minin* (jalan orang-orang yang beriman), para pemimpin *dakwah hizbiyyah* sangat dekat dengan dosa karena melakukan perbuatan *bid'ah,* para anggota gerakan *dakwah hizbiyyah* memahami konsep *al wala wa al bara* dengan dasar kesetiaan terhadap pemimpin tertentu, bukan loyalitas terhadap Al Qur'an dan Sunnah Nabi serta *dakwah hizbiyyah* mengajarkan fanatisme golongan. Lihat Ahmad Bunyan Wahib, *Gerakan,* 24.

[38] *Ibid.*, 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duduk di parlemen. Parpol lupa tentang aspirasi rakyat yang seharusnya parpol laksanakan. Wallahulmusta'an.....[39]

Munculnya kelompok atau gerakan politik yang memiliki ribuan bahkan jutaan umat, tetapi tidak diimbangi oleh ulama' sebagai pembimbing. Manusia yang masuk di dalamnya dikatakan oleh Syaikh Al Albani sebagai manusia yang hidup dalam kekacauan dan kebingungan. Syaikh Al Albani menasehati sekaligus mengkritik Hizbut Tahrir terkait mendirikan negara Islam. Selayaknya, Hizbut Tahrir mempelajari seluk beluk dan pokok-pokok syari'at Islam. Ironinya, Hizbut Tahrir menulis buku-buku dengan menggunakan sepenggal dalil-dalil dan hadits-hadits yang tidak shahih.[40]

Hizbut Tahrir merespon nasehat tersebut justru dengan meminta tolong Syaikh Al Albani atas fatwanya. Menurut Syaikh Al Albani, hal tersebut adalah merupakan kekalahan pertama, ketika partai mengandalkan diri dari pihak lain artinya kekuatannya tidak sempurna. Sebuah partai tidak hanya memerlukan dokter medis, bahkan dokter rohani untuk mendidik anggotanya.[41]

Syaikh Al Albani pun berandai-andai, apabila Hizbut Tahrir suatu hari dapat mengibarkan bendera negara Islam dengan cara revolusi, sedangkan rakyat tidak siap untuk menerima berlakunya hukum Islam, misalnya melarang adanya bioskop, melarang adanya lokalisasi perjudian dan perzinaan bahkan melarang perempuan keluar tanpa jilbab. Rakyat yang tidak terdidik dengan

---

[39] Ibnu Muslim, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011.
[40] Syaikh Abdul Malik Al Jazair, *Haramkah,* 58.
[41] *Ibid.*, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari'at akan melakukan pemberontakan sehingga menimbulkan *chaos* pada pemerintahan. Maka perlu adanya ulama' untuk mendidik para anggota partai dengan ajaran Islam. Sayangnya, dewasa ini partai memaknai jihad bertujuan untuk merebut kekuasaan. Kelompok akan berusaha untuk meraih dan menggunakan kekuasaan untuk melaksanakan semua undang-undang dan ketetapan pemerintah baik yang hak atau bathil, walau tidak ada ajarannya dalam Islam.

3. Sikap Politik Kaum Salafi Terhadap Pemerintah

a. Cara Taat pada Pemerintah

Kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin adalah perkara yang telah disepakati secara *ijma'* oleh *Ahlus Sunnah Wal Jamaah* yang dibangun dengan dalil-dalil syari'at yang jelas dan mutawatir.[42] Hal tersebut adalah prinsip yang berbeda dengan *ahlul bid'ah* dan para pengikut hawa nafsu. *Salafus Shalih* memperhatikan perkara kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa secara khusus ketika muncul bibit-bibit fitnah. Hal ini dikarenakan *salafus shalih* melihat akibat dari kebodohan dan kelalaian sehingga menimbulkan kerusakan dan kekacauan yang meluas dan berkepanjangan yang akan menimpa rakyat dan negara serta menimbulkan penyimpangan dari jalan yang lurus.

---

[42] Syaikh Abu 'Adirrahman Fauzi Al Atsari, *Meredam Amarah Terhadap Pemerintan: Menyikapi Kejahatan Penguasa Menurut Al Qur'an dan Assunnah* terj. Al Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Umar As Sewed (Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2006), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salafus shalih juga memerintahkan untuk memuliakan dan mendukung penguasa serta melarang untuk mencaci maki dan merendahkannya. Hal ini disinggung oleh Imam Al Qarafi dalam kitabnya *Adz Dzakhirah* yakni:

> (Terdapat sebuah) kaidah bahwa menjaga kemaslahatan umum adalah wajib. Sedangkan, kemaslahatan umum tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya kewibawaan penguasa dihadapan rakyat. Ketika rakyat berselisih (tidak taat) terhadap mereka atau mereka menghinakan penguasa maka akan hilanglah maslahat tersebut.[43]

Ibnu Jama'ah dalam *Tahriril Ahkam fi Tadbiri Ahlil Islam,* ketika membicarakan tentang masalah hak-hak pemerintah yakni:

> Hendaklah diketahui ketinggian hak mereka dan apa yang diwajibkan untuk mereka yaitu menghormati dan memuliakannya. Hendaklah mereka diperlakukan dengan apa yang wajib untuk mereka yaitu penghormatan, pemuliaan dan apa yang Allah berikan dari pengagungan.[44]

Menurut ulama' di atas, syari'at telah memberikan kepada penguasa kedudukan yang tinggi dan mewajibkan rakyat untuk menghormati, memuliakan dll dari perkara yang menunjukkan kebesaran seorang penguasa. Para ulama' percaya, barang siapa yang memuliakan penguasa dengan menjaga apa yang telah ditetapkan syari'at dari hak dan kewajibanya, seperti meninggikan, menghormati, mendukung dengan tidak lepas dari *amar ma'ruf,* maka balasannya yaitu Allah akan memuliakannya

---

[43] *Ibid.*, 82.
[44] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dunia ini, meninggikan derajatnya dan menggerakkan hati para hamba untuk memuliakannya. Dan di akhirat Allah memuliakannya dengan surga.

Pendapat ulama' Salaf digunakan sebagai rujukan menjawab wawancara tentang tata cara kaum Salafi taat pada pemimpin dan Harianto mengatakan, "Menaati apa-apa yang diwajibkan oleh pemerintah atas kaum Salafi selama tidak menyelisihi syari'at".[45] Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Irwan dengan berkata, "Mentaati mereka dalam perkara yang *ma'ruf* dan menasehati mereka dalam perkara mungkar dengan tetap menjaga etika yang berlaku, kemuliaan, kehormatan dan kewibawaan pemerintah".[46]

b. Hukum Kudeta pada Pemerintah

Fadhilatusy Syaikh Al 'Allamah Asy Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz ditanya tentang upaya *Al Khuruj* (kudeta atau penggulingan) penguasa yang dzalim sebagai berikut:

"Wahai Syaikh yang mulia, didapati beberapa pihak yang berpandangan bahwa jatuhnya beberapa penguasa kepada beberapa kemaksiatan dan dosa besar mengharuskan adanya upaya penggulingan penguasa dan upaya pergantian (dengan penguasa yang baru) walaupun upaya tersebut menimbulkan efek negatif bagi kaum muslimin di negerinya,

[45] Harianto, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 20.00.
[46] Irwan, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 20.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berbagai macam tragedi telah menimpa kaum muslimin di dalam dunia Islam ini?"[47]

Kemudian Asy Syaikh 'Abdul Aziz 'Abdullah bin Bazz berfatwa bahwa tidak boleh bagi pengikutnya untuk menentang dan melakukan kudeta terhadap penguasa kecuali apabila terdapat kekhufuran secara nyata yang memiliki kejelasan dari Allah. Tindakan kudeta dan upaya penggulingan terhadap penguasa menimbulkan kerusakan dan kejahatan yang besar sehingga keamanan tidak stabil dan banyak hak-hak asasi yang dilanggar, serta menjadi sulit usaha untuk mencegah orang yang berbuat kedzaliman dan menolong orang-orang yang terdzalimi serta dibunuhnya orang-orang yang tidak pantas dan tidak boleh untuk dibunuh. Maka wajib bagi mereka untuk bersabar serta bersikap mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf dan terus dilakukan upaya nasehat dan dakwah kepada para penguasa tersebut.[48]

Berdasarkan fatwa di atas, titik tekan Asy Syaikh 'Abdul Aziz 'Abdullah bin Bazz bahwa upaya penggulingan (*al khuruj*) kepada penguasa tidak boleh dilakukan kecuali apabila memenuhi dua syarat penting yaitu:[49]

Pertama, adanya kekhufuran yang nyata (yang dilakukan oleh penguasa) yang kalian memiliki *burhan* (kejelasan dan bukti) dari tentang

---

[47] Luqman bin Muhammad Ba'abduh, *Mereka adalah Teroris!* (Malang: Pustaka Qaulan Sadida, 2005), 254.
[48] *Ibid.*, 255.
[49] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekhufuran tersebut. *Kedua,* adanya kemampuan untuk melakukan upaya penggulingan penguasa (yang telah kafir) tersebut yang tidak menimbulkan efek negatif yang lebih besar. Jadi, tanpa semua itu tidak dibenarkan tindakan *al khuruj* tersebut.

Selanjutnya, fatwa Asy Syaikh Al Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al Albani ketika ditanya tentang hukum upaya *al khuruj* terhadap *waliyul amr,* beliau menjawab:

> Pertanyaan seputar *al khuruj* pada hari-hari ini, tepatnya disebut sebagai "topik masa kini bagi para pemuda dalam dunia Islam", di antara mereka ada yang bertanya kemudian mereka melaksanakan atau mempraktekkan fatwa (jawaban) para 'ulama tentang apa yang telah mereka tanyakan. Di antara mereka ada yang sama sekali tidak mau bertanya, bahkan dengan penuh emosi mereka berupaya melakukan *al khuruj* (kudeta) terhadap penguasa yang ternyata pada prakteknya mereka tidak mampu melakukan sesuatu apapun.[50]

Asy Syaikh Al Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al Albani menambahkan bahwa upaya *al khuruj* kepada penguasa dalam pandangan syari'at adalah perkara yang boleh bahkan bisa menjadi wajib, tetapi harus memenuhi syarat yaitu: [51]

Pertama, kaum muslimin telah mendapati kekhufuran yang jelas dan nyata. *Kedua,* bahwa upaya *al khuruj* masih dalam ruang lingkup

---

[50] Berkata Asy Syaikh 'Abdul Malik Ramadhani, "Dan di antara mereka ada yang mau bertanya (kepada para 'ulama) namun pada prakteknya mereka menyelisihi fatwa para 'ulama tersebut. Kemudian berusaha untuk mengelabuhi orang lain bahwasannya para 'ulama telah mendukung dia dalam upaya penggulingan tersebut." Sebagaimana hal ini telah terjadi kepada sang penanya ini (ketika bertanya kepada Asy Syaikh Al Albani) dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Lihat Luqman bin Muhammad Ba'abduh, *Mereka adalah Teroris!,* 256.

[51] *Ibid.*, 256-257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan rakyat untuk menggantikan penguasa yang sedang berkuasa tanpa menimbulkan pertumpahan darah yang banyak sekali. Sementara realita yang ada di negeri muslim, bahwasannya mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya *al khuruj* tersebut. Hal ini karena penguasa telah menguasai meraka secara penuh dengan berbagai macam bentuk kekuatan dan senjata, yang dengan itu para penguasa menjadikannya sebagai benteng untuk menghalangi berbagai macam bentuk kejahatan dari pihak-pihak yang mungkin melakukan upaya kudeta kepada mereka dari rakyat.

> Atas dasar tersebut, "Kami mengatakan bahwa wajib kepada seluruh kaum muslimin untuk mereka memperhatikan perkara-perkara yang mungkin untuk mereka lakukan yaitu dengan mereka belajar tentang Islam dengan bentuk Islam yang telah bersih kemudian mendidik diri mereka di atas ketentuan-ketentuan Islam yang benar. Perkara ini semua mungkin untuk mereka dengan berpikir untuk melakukan upaya-upaya yang di luar batas kemampuan mereka yang kemudian melalaikan mereka untuk melakukan perkara-perkara (ketaatan) yang masih dalam batas-batas kemampuan mereka".[52]

Disebutkan juga oleh Asy Syaikh Muqbil Al Wadi'i dalam kitabnya *Tuhfatul Mujib,* saat menjawab pertanyaan seorang wartawan dari Jerman dengan sebuah pertanyaan teksnya yaitu:

"Apa tindakan penentangan (kudeta) melawan penguasa dibenarkan (dalam Islam)?"

---

[52] Perlu para pembaca sekalian ketahui, bahwa di antara kaidah-kaidah penting dalam agama Islam yang harus diketahui oleh setiap muslim di dalam beribadah kepada Allah adalah: "Bahwa seluruh kewajiban dalam agama Islam yang telah diwajibkan oleh Allah terkait dan terbatasi oleh adanya kemampuan hamba untuk melakukannya". Lihat selengkapnya halaman 421 dan 642.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sikap penentangan (kudeta) kepada penguasa merupakan musibah dari sekian musibah yang menimpa kaum muslimin sejak zaman dahulu. Dan *ahlus sunnah* –*alhamdulillah*—tidak berpandangan tentang bolehnya melakukan tindakan penentang (kudeta) kepada seorang penguasa yang muslim", karena Rasulullah menyatakan dalam haditsnya: *"Jika ada pihak yang mendatangi kailian dalam kondisi telah sepakat atas kepemimpinan seseorang dan pihak tersebut handak memecah tongkat (ketaatan) kalian (terhadap pemimpin tersebut) atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia"* (HR. Muslim). Dan Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah barsabda: *"Jika telah dibai'at dua khalifah, maka penggallah leher (khalifah) yang (dibai'at) terakhir di antara keduanya"* (HR. Muslim).[53]

Maka, menurut Asy Syaikh Muqbil Al Wadi'i tindakan kudeta (penentangan) terhadap penguasa tergolong sebuah fitnah yang menyebabkan tertumpahnya darah dan melemahkan kaum muslimin. Sekalipun penguasa tersebut kafir maka harus ada pada kaum muslimin kekuatan (kemampuan) untuk menghadapinya sehingga dengan itu tidak terjadi pertumpahan darah antar kaum muslimin, karena Allah berfirman: *"Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya, serta menyediakan baginya adzab yang besar"* (An Nisa' : 93).[54]

Dalam sejarah *ahlus sunnah* sejak zaman dahulu tidak pernah membenarkan adanya tindakan kudeta (penentangan) terhadap penguasa yang muslim. Di zaman ini pula tindakan kudeta (penentangan) terhadap

---

[53] *Ibid.*, 258-259.
[54] *Ibid.*, 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penguasa yang kafir sekalipun, memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apabila ternyata penguasa tersebut (melakukan kekufuran) dengan sebab kebodohannya, maka wajib penguasa tersebut untuk dinasehati. Dan dengan syarat pula upaya kudeta (penentangan) tersebut tidak mengantarkan kepada kemungkaran yang jauh lebih besar serta menimbulkan pertumpahan darah kaum muslimin.[55]

Begitu pula Faqihul *'Ashr Asy Syaikh Al 'Allamah* Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin berpendapat seputar permasalahan *al khuruj* (kudeta dan penentangan) terhadap penguasa yakni:[56]

Pertama, tindakan *al khuruj* (kudeta) terhadap penguasa sama sekali tidak dibenarkan kecuali jika mereka telah melakukan kekhufuran yang nyata, sesuai sabda Rasulullah: *"Kecuali jika kalian melihat (mendapati) kekhufuran yang nyata (pada penguasa tersebut) yang kalian memiliki burhan (bukti) dari Allah tentang kekhufurannya"* (Muttafaqun 'Alaihi).

Kedua, pengetahuan (bukti dan *hujjah*) tentang kekhufuran mereka, **dan hanya para 'ulama sajalah yang mampu menentukan (memutuskan) kekhufuran tersebut.**[57] Sementara Asy Syaikh Al 'Utsaimin sendiri tidak bisa menghukumi pemerintah-pemerintah kalian karena tidak mengetahui kondisinya.

---

[55] *Ibid.*
[56] *Ibid.*, 261-262.
[57] Artinya keputusannya tidak diserahkan pada sembarang orang dan hal ini merupakan catatan yang penting menurut Asy Syaikh Al 'Utsaimin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, adanya kepastian kemaslahatan di balik tindakan *al khuruj* (kudeta) tersebut sekaligus kepastian tidak adanya efek negatif di balik itu. Dan yang menentukan (menimbang) perkara ini hanya *Ahlul 'Ilmi* ('ulama). *Keempat,* adanya kemampuan pada kaum muslimin untuk menumbangkan penguasa yang kafir tersebut.

Pembicaraan di atas hanya bersifat teori, maka Asy Syaikh Al 'Utsaimin memberikan sebuah nasehat: "Saya menasehati agar mereka tidak tergesa-gesa dan hendaknya mereka berdakwah dengan didasari hikmah serta meninggalkan keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas (*al khuruj*) tersebut".[58] Pada hakekatnya secara mayoritas kekuasaan dan kekuatan lebih dimiliki oleh penguasa-penguasa tersebut (dibanding rakyat).

> Al Imam Al Lalika-i berkata, "Tidak boleh bagi seseorang pun untuk membunuh dan memberontak terhadap penguasa (muslim). Barang siapa yang melakukan hal itu (membunuh dan memberontak) maka dia adalah *mubtadi',* tidak di atas sunnah dan jalan (yang lurus)".[59]

Menurut Sahl bin 'Abdullah At Tusturi seseorang diketahui bahwa dia berjalan di atas *as sunnah dan al jama'ah,* jika diketahui 10 kriteria dalam dirinya yaitu, tidak meninggalkan *al jama'ah,* tidak mencela para sahabat Nabi, tidak memberontak pada penguasa dengan mengangkat senjata, tidak mendustakan taqdir, tidak ragu masalah iman, tidak berdebat masalah agama, tidak meninggalkan shalat terhadap jenazah siapa saja yang dalam keadaan berdosa dari kalangan *ahlul qiblah,* tidak meninggalkan

---

[58] Luqman bin Muhammad Ba'abduh, *Mereka,* 262.
[59] *Ibid.*, 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengusap atas dua *khuf* (dalam wudhu') dan tidak meninggalkan shalat berjama'ah di belakang *waliyul amri* baik yang *fajir* (jahat dan zhalim) maupun adil. Para 'ulama *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* telah sepakat tentang wajibnya taat kepada pemerintah muslimin dan dilarang memberontak kepada penguasa yang *fajir* maupun yang adil.[60]

c. Pandangan pada Pemerintah Indonesia

Pandangan kaum Salafi terhadap pemilihan pemimpin di Indonesia direspon oleh Harianto, selaku Jama'ah Salafi di Kabupaten Blitar, mengatakan sebagai berikut:

> Di dalam sistem demokrasi tidak dibedakan antara orang yang berkompeten dan orang yang tidak berkompeten, sedangkan kebanyakan dari rakyat adalah orang-orang yang tidak berkompeten, sehingga mustahil terhasilkan pemimpin yang memenuhi kriteria yang layak sebagai pemimpin.[61]

Hal yang sama disampaikan oleh Irwan dengan mengatakan sebagai berikut:

> Seharusnya pemimpin dipilih oleh orang-orang yang benar-benar memahami permasalahan kepemimpinan. Kenyataan permasalahan pemerintahan adil dan amanah sehingga terpilih pemimpin yang terbaik. Bukan peraih suara tarbanyak, sementara kebanyakan rakyat memilih berdasarkan kecondongan perasaan, fanatisme golongan atau informasi sekilas semasa kampanye yang sesungguhnya jauh dari cukup untuk memilih pemimpin yang akan menentukan nasib suatu bangsa.[62]

---

[60] *Ibid.*, 263.
[61] Harianto, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari pukul 20.00.
[62] Irwan, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 20.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Harianto sikap kaum Salafi pada pemerintah Indonesia adalah:

> Menaati dan memuliakan mereka sebagai pemimpin kaum yang muslim dan menunaikan hak-haknya sebagai penguasa. Kaum Salafi sebagai rakyat dan membantu mereka untuk mewujudkan kemaslahatan berbangsa dan bernegara dan bersabar atas kekurangan mereka.[63]

Komentar yang sama muncul dari Irwan yakni:

> Sebagai pemerintah yang dipimpin oleh seorang muslim yang memberikan kebebasan bagi kaum muslimin menjalankan syari'at agama kaum Salafi mengakui kepemimpinannya. Menaati dan memuliakanmya sebagai pemimpin negara serta membantunya sesuai dengan bidang dan kemampuan Kami untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan Kami bersabar atas kekurangannya serta mendoakan agar Allah SWT senantiasa memberikan *hidayah* dan *inayah*-Nya kepada pemimpin, sehingga bisa memimpin negeri ini mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.[64]

Kualifikasi dalam pemilihan pemimpin hanya bersifat administratif yang tidak kualitatif, seperti minimal lulusan SMA, tidak memiliki gangguan kesehatan, didukung berapa persen dari penduduk atas suatu wilayah dll. Hal tersebut di atas, diperparah dengan perilaku pemilih yang tidak mempertimbangkan pilihannnya secara rasional. Budaya politik uang, fanatisme golongan bahkan kaburnya informasi kredibilitas pemimpin mewarnai demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan realitas di atas, kaum Salafi terlihat terpaksa hidup dalam iklim demokrasi. Dalam situasi tersebut, kaum Salafi diwajibkan untuk

---

[63] Harianto, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 20.00.
[64] Irwan, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 20.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap menaati pemimpin dan diminta bersabar dengan segala kekurangan pemimpin. Pertanyaannya, sampai kapan rakyat bisa bersabar? Kemiskinan, kesenjangan keadilan, KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dipertontonkan setiap hari pada rakyat, sehingga kepentingan kesejahteraan bagi rakyat kurang tersentuh.

4. Pandangan Kaum Salafi Tentang Wacana Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia diperoleh dan dibawa sejak kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak yang dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin karena bersifat hak asasi bersifat universal. Dasar semua hak azasi bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita.[65]

Wacana tentang kebebasan Hask Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Baharrudin Ramadhani Wicaksono, selaku Jama'ah Salafi di Kabupaten Blitar, mengatakan sebagai berikut:

> Menurut kaum Salafi, kebebasan HAM di Indonesia cukup bagus, warga negaranya diberi hak sesuai dengan pilihannya dan dilindungi undang-undang. Masing-masing menjalankan agama sesuai keyakinannya, tanpa memaksakan kehendak kepada agama lain.[66]

---

[65] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Imu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), 120.

[66] Baharrudin Ramadhani Wicaksono, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 22.22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebebasan beragama di Indonesia hanya menjadi wacana semata. Kebebasan beragama masih didominasi oleh kalangan mayoritas yang intervensi terhadap otoritas negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Akhir-akhir ini, komunitas besar agama memberikan tekanan-tekanan kepada komunitas kecil yang *notabene*-nya berbeda aliran. Contoh: tekanan-tekanan terhadap Ahmadiyyah oleh FPI (Front Pembela Islam) diperparah dengan sikap kurang tegas pemerintah terhadap eksistensi Ahmadiyyah.

Saat ini, kaum Salafi merasa tercover dengan perlindungan pemerintah dengan tidak menyentuh wilayah politik. Kaum Salafi terfokus pada Islamisasi masyarakat tanpa kekerasan dan menggunakan media politik, sehingga pemerintah melegalkan keadaannya. Berbeda dengan Laskar Jihad yang keberadaannya menimbulkan kontroversi yakni gerakan keagamaan yang cenderung menekuni wilayah politik. Akibatnya, pada perkembangan dan perjalannya Laskar Jihad dibubarkan oleh pemerintah.

5. Respon Kaum Salafi Terhadap Antusiasme Gender dalam Parlemen

Penggalan ayat yang berbunyi, "*Dan laki-laki tidaklah seperti perempuan*" (Ali 'Imran : 36), demikian ucapan istri 'Imran (ibunya Maryam) yang dibadikan dalam Al Qur'an. Pernyataan tersebut keluar ketika anak yang dilahirkan ternyata seorang perempuan, bukan laki-laki. Padahal ketika mengandung telah bernazar agar anak yang dilahirkan dapat berkhidmat di Baitul Maqdis. As Syaikh Al 'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir As Sa'di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkata dalam tafsirnya, "Dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan keutamaan laki-laki daripada wanita".[67]

Fatwa Syaikh Nashiruddin Al Albani tentang hukum kaum perempuan mengikuti pemilu sebagai berikut:

> Boleh, dengan syarat memenuhi kewajiban-kewajibannya yaitu memakai jilbab secara *syar'i,* tidak bercampur-baur dengan laki-laki, kemudian memilih orang-orang yang paling dekat *manhaj* ilmu yang benar untuk dapat merealisaikan prinsip menghindari kerugian lebih besar dengan melakukan kesalahan sekecil-kecilnya (*daf'ul mafsadatil qubra fis sughra*).[68]

Maksud ucapan ulama' adalah untuk menyatakan memang perempuan berbeda dengan laki-laki dari sisi tugas yang dibebankan oleh penetapan syari'at, walaupun dihadapan hukum syari'at laki-laki dan perempuan sama-sama hamba yang mukallaf. Dalam masalah pahala dan hukuman atas amalan yang dilakukan pun sama. Samatus Syaikh Ibnu Bazz mengatakan bahwa Allah telah menetapkan kaum laki-laki sebagai pemimpin yang diberi tanggungjawab untuk menafkahi perempuan berada di bawah tanggungjawabnya. Sedangkan, Allah telah menetapkan agar perempuan tetap tinggal di rumah, tidak keperluan karena keperluan mendesak dan harus menghindarkan diri dari *tabarruj* (mempertontonkan perhiasan selain *mahram*).[69]

---

[67] Asy Syaikh Abu Abdirrahman Yahya bin Ali Al Hajuri, *Kehancuran Di Balik Kemajuan Semu yang Menipu* terj. Ummu Ishaq Zulfa Husein Al Atsariyyah (Yogyakarta: Pustaka Al Haura', 2005), 9-10.

[68] Syaikh Abdul Malik Al Jazair, *Haramkah,* 72-73.

[69] Asy Syaikh Abu Abdirrahman Yahya bin Ali Al Hajuri, *Kehancuran,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, ketetapan dan aturan syari'at, artinya keluarnya perempuan untuk bekerjasama dengan kaum laki-laki di luar rumah dinilai sebagai penyelisihan dan penyimpangan terhadap syari'at, perbuatan tersebut akan menimbulkan fitnah dan kerusakan moral. Fitnah besar akan timbul ketika perempuan duduk berdampingan dengan laki-laki di kantor. Perempuan tersebut menampilkan kecantikannya dari mulai tatanan busana, *make up,* tatanan rambut dll. Para ulama' Salafi menyatakan perempuan dan laki-laki terkadang bersentuhan, berpandangan mata, tersenyum bahkan hanya berdua, hal ini dilarang keras dalam syari'at. Perempuan pun dilarang memasuki lahan pekerjaan laki-laki, termasuk seruan emansipasi.

Berdasarkan hal di atas, S. Fauziah satu-satunya perempuan kaum Salafi yang memiliki penilaian terhadap gender, mengatakan sebagai berikut:

> Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu dengan hikmah yang sempurna. Maka tidak bisa isu gender digunakan untuk mendikotomikan antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Jika salah satu pihak melampaui apa yang menjadi kadarnya, maka yang terhasilkan adalah kerusakan dan penyia-nyiaan terhadap tugas asasinya.[70]

Sementara, Agung Dwi Nugraha mengomentari pertanyaan yang sama dan berkata:

> Gender dalam *manhaj salaf* dipandang secara adil di atas ilmu dari sisi hak keilmuan antara perempuan dan laki-laki adalah sama, tetapi antara perempuan dan laki-laki dibedakan sesuai kodrat bawaannya.[71]

---

[70] S. Fauziah, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 15 Januari 2011 jam 09.00.

[71] Agung Dwi Nugroho, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 22.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat singkat dan kurang bisa dipahami keluar dari Baharrudin Ramadhani Wicaksono yakni:

> Gender ditempatkan pada tempatnya, Salafi memberikan hak kepada tiap orang sesuai haknya.[72]

Pertanyaan selanjutnya tentang di mana seharusnya posisi perempuan dalam politik, apabila ulama' Salafi melarang laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu pekerjaan. Dunia politik merespon keseteraan laki-laki dan perempuan dengan membuka quota 30% pencalegan untuk diisi oleh perempuan akhirnya jika perempuan terpilih maka perempuan akan bekerjasama dengan laki-laki dalam ranah politik, misal parpol, pemerintahan, LSM, dan sebagainya. Realitas tersebut bertabrakan dengan pendapat para ulama' Salafi. S. Fauziah mengatakan sebagai berikut:

> Jika yang difahami dengan "politik" adalah mewujudkan kebaikan secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekedar "perebutan kekuasaan", maka peran perempuan sangat luas dan esensial. Yang tersebar dan tidak tergantikan adalah peranannya dalam mendidik generasi dalam keluarga. Dimana keluarga adalah sebuah organisasi terkecil dalam suatu bangsa. Tidak akan menjadi baik sesuatu yang besar tanpa memperbaiki komponen terkecilnya. Tidak akan terhasilkan pemimpin yang memenuhi seluruh kriteria kebaikan, kecuali dimulai tempaan dan ukirannya sejak awal mula. Sebagaimana pepatah : *"Selalu ada Wanita hebat di belakang Pria yang besar"*.[73]

---

[72] Baharrudin Ramadhani Wicaksono, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 22.32.

[73] S. Fauziah, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 15 Januari 2011 jam 09.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baharrudin Ramadhani Wicaksono, ketika dimintai jawaban mengenai di mana seharusnya posisi perempuan dalam politik, mengatakan sebagai berikut:

> Perempuan memiliki peran serta tersendiri untuk mendidik penerus bangsa dan menciptakan kondisi yang harmonis bagi tumbuh kembangnya penerus bangsa.[74]

Agung Dwi Nugroho, ketika ditanya pandangan di atas, berkata sebagai berikut:

> Perempuan memiliki wilayah tersendiri dalam partisipasinya dalam politik yang tidak tergantikan oleh siapapun baik laki-laki maupun yang lain (pembantu, baby sitter dll). Baiknya kondisi suatu bangsa dimulai dari baiknya kondisi keluarga untuk menjadi generasi yang berkualitas dan ini bukanlah tugas yang ringan.[75]

Fenomena antusiasme gender yang masuk dalam politik (parlemen), menurut S. Fauziah adalah perbuatan yang tidak perlu karena isu emansipasi adalah salah kaprah. Berikut pernyataan S. Fauziah:

> Perempuan tidak perlu terjun ke dalam politik praktis untuk mewujudkan peranannya. Dia dapat masuk ke berbagai lini-lini pembangunan yang sesuai dengan kemampuannya tanpa mengesampingkan tugas asasinya. Tidak selayaknya dia terjebak dalam isu emansipasi yang salah kaprah. Keikutsertaannya dalam membangun sendi perpolitikan, menyiapkan fondasi kehidupan bernegara yang kuat, akan lebih bermakna dan bermanfaat.[76]

---

[74] Baharrudin Ramadhani Wicaksono, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 22.32.

[75] Agung Dwi Nugroho, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 22.00.

[76] S. Fauziah, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 15 Januari 2011 jam 09.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertukaran tempat laki-laki dan perempuan dalam politik (parlemen), akan menimbulkan kekacauan karena politik adalah lahan laki-laki bukan perempuan. Agung Dwi Nugraha mengatakan:

> Perempuan dan laki-laki memiliki wilayah tanggungjawab yang berbeda yang memiliki konsekuensi di dunia dan akhirat. Jika keduanya bertukar tempat, maka keadaan akan kacau. Untuk tampil di parlemen itu adalah tanggungjawab laki-laki dan jangan mengira tanggungjawab perempuan di keluarga yang dianggap sepele oleh kebanyakan manusia adalah tanggungjawab yang ringan.[77]

Sedangkan, menurut Baharrudin Ramadhani Wicaksono sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya akan menimbulkan kekacauan. Tetapi, penekanan Baharrudin bukan masalah gender atau bukan, tetapi masalah pemimpin yang benar-benar ahli untuk duduk di parlemen. Baharrudin berkata sebagai berikut:

> Jika suatu hal ditempatkan bukan pada tempatnya maka yang terjadi adalah kekacauan. Tiap lini kepemimpinan suatu negara harus dipimpin oleh orang yang benar-benar ahli. Bukan masalah membedakan gender, tetapi politik itu butuh pemimpin yang benar-benar ahli.[78]

Berdasarkan hal di atas, menurut pandangan kaum Salafi di Kabupaten Blitar antusiasme gender terkait keterlibatan perempuan dalam dunia politik tidak perlu dan salah kaprah. Kemudian, bagaimana penilaian kaum Salafi ketika perempuan sudah masuk dalam kancah politik. S. Fauziah pun menyatakan:

---

[77] Agung Dwi Nugroho, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 22.00.

[78] Baharrudin Ramadhani Wicaksono, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 22.32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Apabila seorang perempuan mengambil beban di luar kadar yang semestinya, maka pasti kewajiban yang seharusnya dia emban menjadi terbengkalai. Hal itu berarti dia merusak dirinya sendiri dan apa-apa yang ditanggungnya. Semestinya disadari bahwa isu gender yang digulirkan hanya merupakan salah satu kendaraan politik dari pihak tertentu untuk menarik simpati masyarakat yang *notabene* mayoritas masyarakat perempuan, namun rendah intelektual.[79]

Kekhawatiran Agung Dwi Nugroho muncul apabila perempuan masuk dunia politik, perempuan akan kehilangan jati diri karena perempuan memasuki ranah yang tidak semestinya. Dunia politik bukan merupakan kapasitas dan tanggungjawab perempuan. Agung Dwi Nugroho berpendapat:

> Mereka akan kehilangan jati diri mereka sebagai perempuan karena mereka memasuki wilayah yang bukan kapasitas mereka dan bukan tanggungjawab mereka. Dan jika mereka mengenal tanggungjawab mereka dengan baik mereka tidak akan berpikir untuk mengambil tanggungjawab laki-laki yang justru akan membebaninya di dunia dan akhirat (*Motifasi akhirat murni adalah ciri Salafi*).[80]

Masuknya perempuan dalam kancah politik, menurut Baharrudin Ramadhani Wicaksono yang berkata:

> Perempuan memiliki peran serta tersendiri untuk menciptakan kondisi yang harmonis dan mendidik penerus bangsa. Jika perempuan masuk ke ranah politik tidak seharusnya dimasuki, maka mereka tidak menempatkan posisi mereka pada tempatnya.[81]

Realitas di Indonesia, perempuan diminta memenuhi quota 30% terkesan politik tambal sulam untuk memenuhi bunyi undang-undang pemilu. Tidak sedikit orang yang bangga ketika melihat perempuan menjadi politisi,

---

[79] S. Fauziah, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 15 Januari 2011 jam 09.00.

[80] Agung Dwi Nugroho, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 22.00.

[81] Baharrudin Ramadhani Wicaksono, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 22.32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pilot, polwan, sopir angkot bahkan tukang becak dengan mengacungkan jempol. Hal ini menurut kaum Salafi adalah "kemajuan semu" yang akhirnya menimbulkan kerusakan bagi kaum muslimin.

6. Perilaku Politik kaum Salafi Terhadap Kebebasan Pers dalam Roda Perpolitikan Indonesia

Berdasarkan perspektif makanistis, pendapat umum yang berkaitan dengan politik atau kekuasaan dapat disebut sebagai efek dari proses komunikasi politik, terutama yang disalurkan melalui media massa khususnya pers. Dengan demikian, pendapat umum dapat direkayasa atau dikendalikan. Pendapat umum yang sehat hanya dapat tumbuh dalam masyarakat yang mempunyai kebebasan berpikir dan kebebasan mengeluarkan pendapat atau perasaan serta kebebasan pers.

Peran pers dalam demokrasi di Indonesia, Baharrudin Ramadhani Wicaksono mengatakan:

> Pers seharusnya menciptakan media yang mempunyai etika dan menciptakan keharmonisan suasana politik di Indonesia. Dan sepak terjang pers dalam roda perpolitikan di Indonesia bagi Baharrudin Ramadhani Wicaksono dinilai bahwa pers terkadang membuat panas suasana politik di Indonesia dan menyampaikan berita yang belum tentu kebenaran faktanya.[82]

Pendapat peran pers Baharrudin Ramadhani Wicaksono berbeda dengan D. Widodo E.S yang mengatakan:

---

[82] Baharrudin Ramadhani Wicaksono, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 14 Januari 2011 jam 22.26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Peran pers dalam demokrasi di Indonesia sangat besar sekali karena dengan dibukanya kran pers di Indonesia maka fungsi pers dalam demokrasi menjadi jelas yaitu untuk menyampaikan program-program dan visi-misi pemerintah dan untuk mendidik bangsa dalam berpolitik yang sehat dan juga dapat menjadi media bagi pemerintah dan keinginan masyarakat. Bagi masyarakat peran pers dapat menjadi media untuk menyampaikan ide dan menyampaikan pendapat kepada pemerintah.[83]

Pernyataan D. Widodo E.S di atas, kontradiksi ketika menjawab pertanyaan tentang bagaimana sepak terjang pers dalam roda perpolitikan di Indonesia. D. Widodo E.S berkata:

> Pers terjebak dalam kepentingan-kepentingan politik karena lebih mengutamakan *rating*-nya dalam pemberitaan dan mendiskriminasikan antara kepentingan pemerintah dan rakyat sehingga seolah-olah antara pemerintah dan rakyat membuka dua kutub yang saling bertentangan atau sengaja dipertentangkan oleh pers. Di sini peran pers hanya untuk mencari sensasi berita sehingga cenderung memperlemah suasana dan keadaan.[84]

Bagaimanapun, eksistensi pers tetap penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat diminta untuk selektif dalam memilih berita dan informasi, tanpa menghakimi eksistensinya. Pers sebagai penunjang informasi bagi masyarakat. Pers juga sebagai ruang opini publik untuk mengawal perpolitikan Indonesia. Tetapi, pers sering terjebak pada *bisnis oriented.*

---

[83] D. Widodo E.S, Jama'ah Salafi, Majelis Taklim Salafi Blitar, 10 Januari 2011 jam 08.00.
[84] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dalam bab-bab terdahulu, maka dengan merujuk pada rumusan masalah serta keseluruhan pembahasan, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, makna politik bagi kaum Salafi adalah strategi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat dunia dan akhirat dengan cara yang *ma'ruf.* Dengan demikian, rakyat diwajibkan mengangkat seorang pemimpin. Menurut kaum Salafi yang berhak berpolitik adalah mujtahid (orang yang mampu berijtihad). Mujtahid dinilai telah mencapai kesempurnaan syari'at, sehingga mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu, kaum Salafi mengklaim lebih terfokus pada Islamisasi masyarakat dengan tidak menyentuh wilayah politik. Kaum Salafi menolak menjadi organisasi karena bertentangan dengan prinsip *hizbiyyah.*

Kedua, perilaku politik bagi kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Indonesia yakni kaum Salafi menyatakan sistem demokrasi merupakan sistem yang tidak sesuai dalam Islam, termasuk penerapannya di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, rakyat tidak memahami konsekuensi demokrasi itu sendiri, sehingga dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu. Tetapi, kaum Salafi sebagai rakyat berpartisipasi aktif dalam demokrasi untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan kemaslahatan. Hal ini, dibuktikan dengan perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi yang bersifat ambigu (melioris) antara menolak dan menerima demokrasi, yakni:

Pemilu, kaum Salafi tidak memiliki ketegasan masuk TPS atau tidak, karena lebih memilih pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan melihat proses pemilu sendiri. *Partai politik,* kaum Salafi memandang partai politik bertentangan dengan prinsip *hizbiyyah,* karena mengabaikan kepentingan-kepentingan dakwah dan lebih terfokus pada pragmatisme kekuasaan. *Pemerintah,* kaum Salafi mewajibkan untuk menaati pemerintah dan menasehatinya secara tertutup, tidak terbatas pada sistem demokrasi atau tidak.

Isu gender, kaum Salafi melarang perempuan memasuki wilayah laki-laki termasuk wilayah politik, karena dapat menyebabkan kehancuran. *Hak Asasi Manusia (HAM),* bagi kaum Salafi adalah hak dengan batas porposional. *Kebebasan pers di Indonesia,* menurut kaum Salafi digunakan secara salah kaprah karena hanya mengutamakan *bisnis oriented* dengan mengeksploitasi permasalahan yang belum tentu kebenarannya.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, karena keterbatasan pemahaman dan data lapangan penulis ada hal yang tertinggal atau terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan dalam bab-bab terdahulu, maka dengan merujuk pada rumusan masalah serta keseluruhan pembahasan, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, makna politik bagi kaum Salafi adalah strategi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat dunia dan akhirat dengan cara yang *ma'ruf.* Dengan demikian, rakyat diwajibkan mengangkat seorang pemimpin. Menurut kaum Salafi yang berhak berpolitik adalah mujtahid (orang yang mampu berijtihad). Mujtahid dinilai telah mencapai kesempurnaan syari'at, sehingga mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu, kaum Salafi mengklaim lebih terfokus pada Islamisasi masyarakat dengan tidak menyentuh wilayah politik. Kaum Salafi menolak menjadi organisasi karena bertentangan dengan prinsip *hizbiyyah.*

Kedua, perilaku politik bagi kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Indonesia yakni kaum Salafi menyatakan sistem demokrasi merupakan sistem yang tidak sesuai dalam Islam, termasuk penerapannya di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, rakyat tidak memahami konsekuensi demokrasi itu sendiri, sehingga dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu. Tetapi, kaum Salafi sebagai rakyat berpartisipasi aktif dalam demokrasi untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan kemaslahatan. Hal ini, dibuktikan dengan perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi yang bersifat ambigu (melioris) antara menolak dan menerima demokrasi, yakni:

Pemilu, kaum Salafi tidak memiliki ketegasan masuk TPS atau tidak, karena lebih memilih pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan melihat proses pemilu sendiri. *Partai politik,* kaum Salafi memandang partai politik bertentangan dengan prinsip *hizbiyyah,* karena mengabaikan kepentingan-kepentingan dakwah dan lebih terfokus pada pragmatisme kekuasaan. *Pemerintah,* kaum Salafi mewajibkan untuk menaati pemerintah dan menasehatinya secara tertutup, tidak terbatas pada sistem demokrasi atau tidak.

Isu gender, kaum Salafi melarang perempuan memasuki wilayah laki-laki termasuk wilayah politik, karena dapat menyebabkan kehancuran. *Hak Asasi Manusia (HAM),* bagi kaum Salafi adalah hak dengan batas porposional. *Kebebasan pers di Indonesia,* menurut kaum Salafi digunakan secara salah kaprah karena hanya mengutamakan *bisnis oriented* dengan mengeksploitasi permasalahan yang belum tentu kebenarannya.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini belum sepenuhnya sempurna, karena keterbatasan pemahaman dan data lapangan penulis ada hal yang tertinggal atau terlupakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikaji ulang yang tentunya lebih teliti, kritis dan juga lebih mendetail guna menambah wawasan dan pengetahuan pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Afadlal dkk. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia,* Jakarta: LIPI Press.

Al Atsari, Syaikh Abu 'Abdirrahman Fauzi. 2006. *Meredam Amarah Terhadap Pemerintah: Menyikapi Kejahatan Penguasa Menurut Al Qur'an dan As Sunnah,* terj. Muhammad Umar As Sewed, Pekalongan: Pustaka Sumayyah.

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial:Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press.

Chozin, Fadjrul Hakam. 1997. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah,* Tropodo: Alpha.

Gaffar, Afan. 1996. *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan, Noorhaidi. 2005. *Laskar Jihad: Islam, Militancy ang The Quest for Identity in Post-New Order Indonesia,* Utreecht: Faculteit der Letteren en International Institute for the Study of Islam in the Modern World.

Hilmy, Masdar. 2009. *Teologi Perlawanan: Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orba*, Yogyakarta: Kanisius.

Idrus, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,* Jakarta: Erlangga.

Al Jazairi, Syaikh Abdul Malik. 1999. *Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen: Fatwa Syaikh Nashiruddin Al Albani,* Yogyakarta: Media Hidayah.

Luqman bin Muhammad Ba'abduh. 2005. *Mereka adalah Teroris!,* Malang: Pustaka Qaulan Sadida.

Al Mawardi, Imam. 2006. *Al Ahkam As-Sultaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* terj Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah.

Moeleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ms, Burhani dan Hasbi Lawrens. (tt). *Kamus Ilmiah Populer,* Jombang: Lintas Media.

Mujahid, Abu dan Haneef Oliver. 2010. *Virus Wahabi: Mitos Negatif bagi Salafi,* Bandung: Toobagus Publishing.

Penyusun, Tim. 2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* Kediri: STAIN Kediri.

Rahmat, M. Imdadun. 2009. *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revibalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia,* Jakarta: Erlangga.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Riyanto, Yatim. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif,* Surabaya: UNESA University Press.

Shepard, William E. (tt). *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History,* ed Syafiq Mughni, Canada: Conundrum Press.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suprayogo, Imam. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan,* Bandung: Sumber Sari Indah.

Syaikh Muhammad bin Rabi' bin Hadi Al Madkholi dan Abu Hasan Mushthofa bin Isma'il As Sulaiman. 2001. *Perbedaan Ahlus Sunnah dan Ahlus Bid'ah Menuju Pemahaman Salaf,* Tegal: Maktabah Salafy Press.

Taimiyah, Ibnu. 2005. *Siyasah syar'iyah: Etika Politik Islam* terj. Rofi' Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti.

Yahya bin Ali Al Hajuri, Asy Syaikh Abu Abdirrahman. 2005. *Kehancuran Dibalik Kemajuan Semu yang Menipu,* Yogyakarta: Pustaka Al Haura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jurnal dan Artikel

Bunyan Wahib, Ahmad. "Gerakan Dakwah Salafi Paska Laskar Jihad". *Gerakan Salafi,* (2007), -: 1-205

Ikhsan, Muhammad. "Gerakan Salafi Modern di Indonesia". *Gerakan Salafi,* (2006), -: 1-8

Nashir, Haedar. "Ketika Salafi Berebut Tafsir", Gatra, 35 (2007), 1

Sa'i, Muhammad. "Gerakan Dakwah Salafiyah: Konflik Ideologis dan Sosial di Lombok Barat". *Gerakan Salafi,* (2006), IV : 99-118

Umar Thalib, Ja'far. "Saya Merindukan Ukhuwah Imaniyah Islamiyah". Majalah Salafy, (1426/2005), Edisi 5: -.

3. *Websites*

http://www.asysyariah.com/

http://www.blitarkab.go.id/

http://www.salafyblitar.blogsome/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id